

MATERI

BIMBINGAN TEKNIS AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BATANG

TAHUN 2016

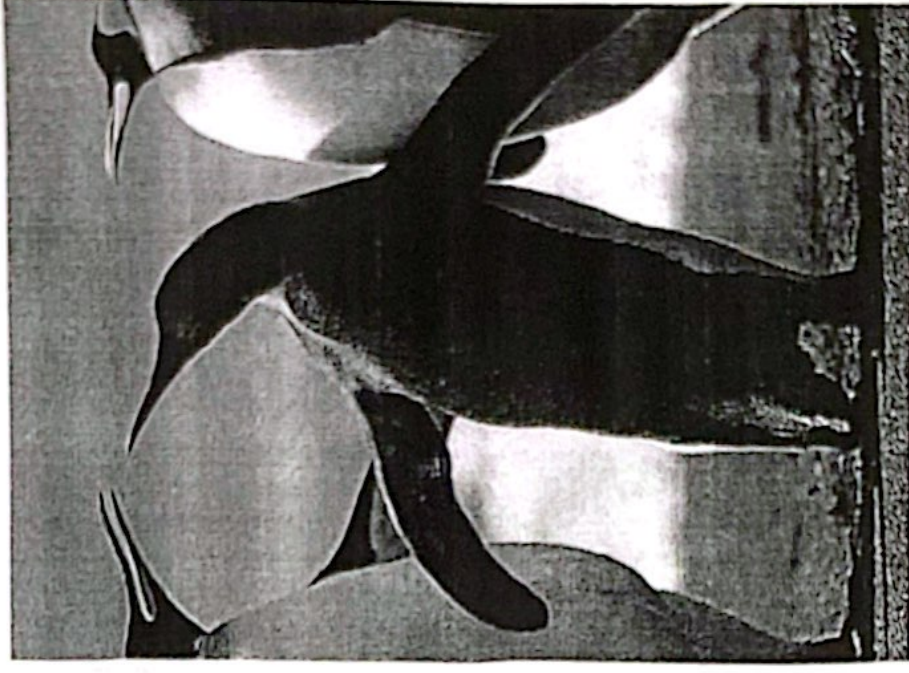
**GAMBARAN UMUM REGULASI
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMKAB BATANG**

OLEH

Kepala

DPPKAD KABUPATEN BATANG



DASAR HUKUM

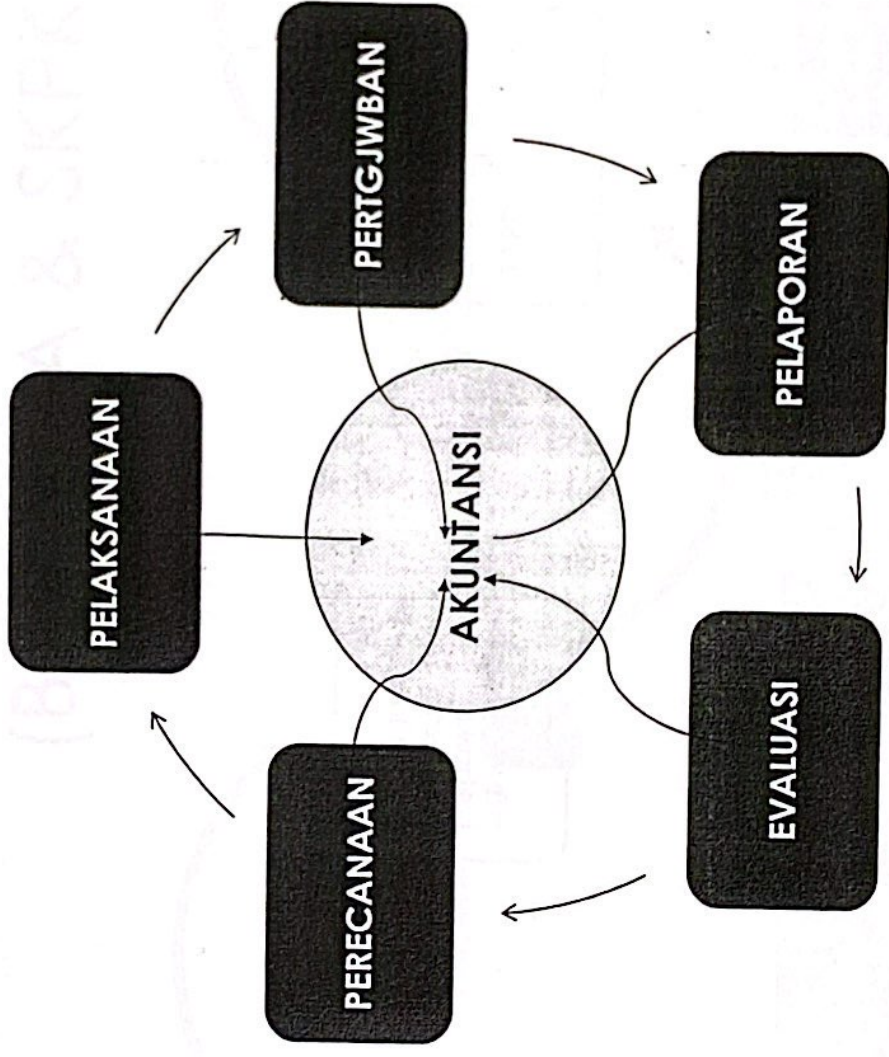
UU
<ul style="list-style-type: none">• 17/2003• 1/2004• 15/2004• 25/2004

PP
<ul style="list-style-type: none">• 24/2005-71/2010• 58/2005• 6/2006

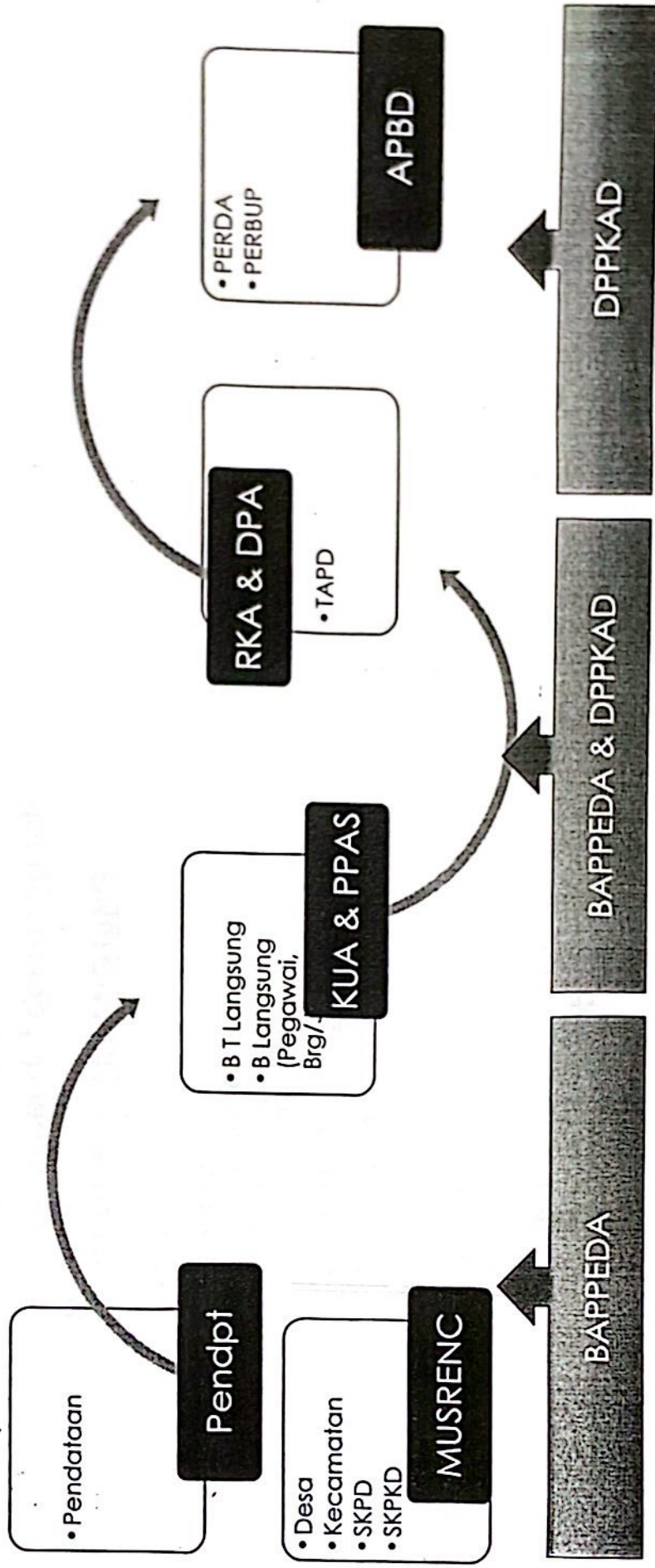
PERMEN
<ul style="list-style-type: none">• Dagri 13,59,21,37• Dagri 17/2007• Keu 238/2011• Dagri 64 / 2013



MANAJEMEN KEUANGAN



PERENCANAAN (BAPPEDA & SKPKD)



STRUKTUR APBD

PENDAPATAN

PAD

Dana Perimbangan

Lain-lain pendpt daerah yg sah

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

B. Pegawai

B. Bunga

B. Subsidi

B. Hibah

B. Bantuan Sosial

B. Bantuan Keuangan

B. Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

B. Pegawai

B. Brang Jasa

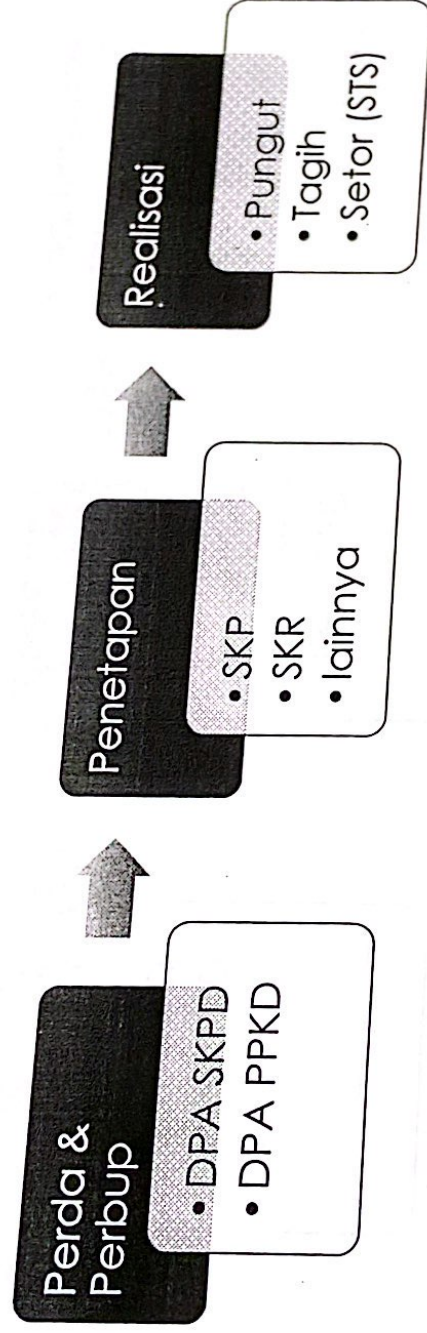
B. Modal

PEMBIAYAN

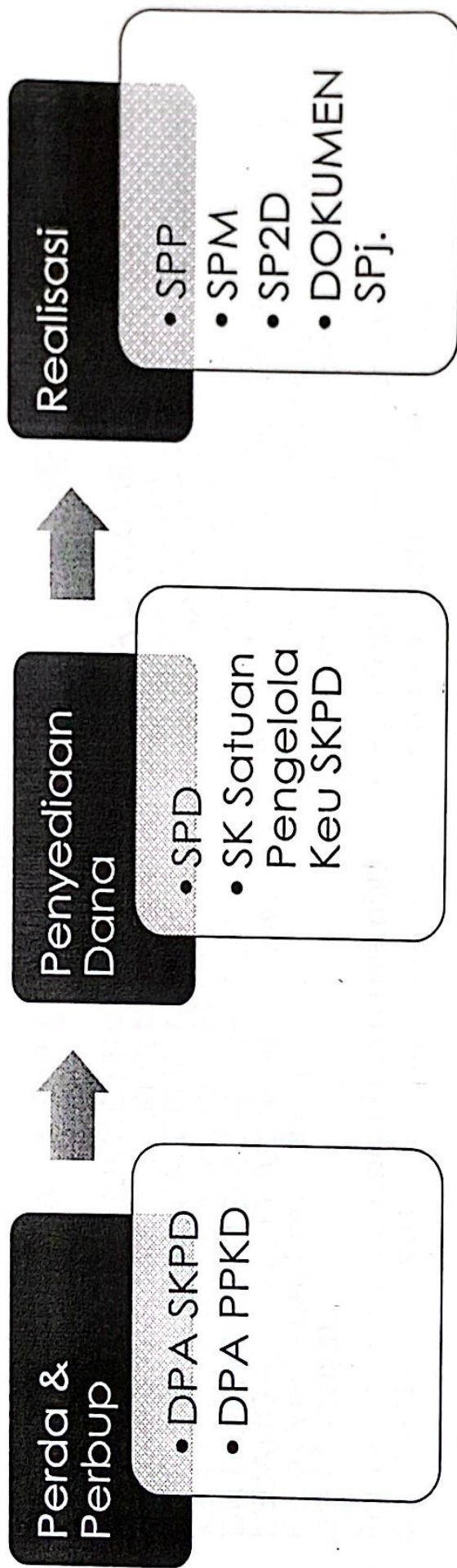
Penerimaan pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

PELAKSANAAN PENDAPATAN



PELAKSANAAN BELANJA



PERTANGUNGJAWABAN KEUANGAN SKPD

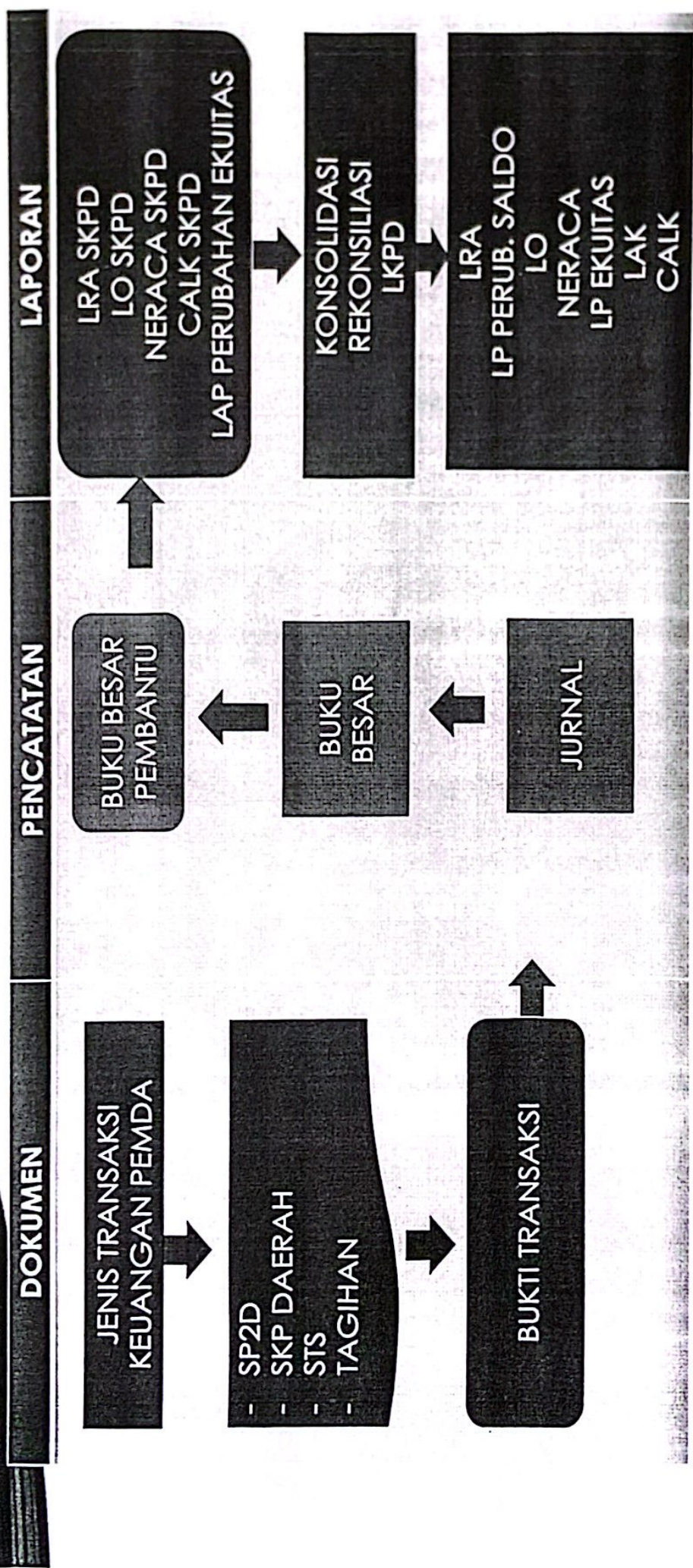
PENDAPATAN

- SEMUA DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI PENDAPATAN MULAI DARI PENETAPAN PENDAPATAN SAMPAI DENGAN SETOR KE KAS UMUM DAERAH, HARUS SUDAH DIVERIFIKASI OLEH SATUAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK, Petugas Akuntansi, Pet P doka, dan bendahara).
- Bendahara penerimaan harus memiliki catatan: (buku kas.....)

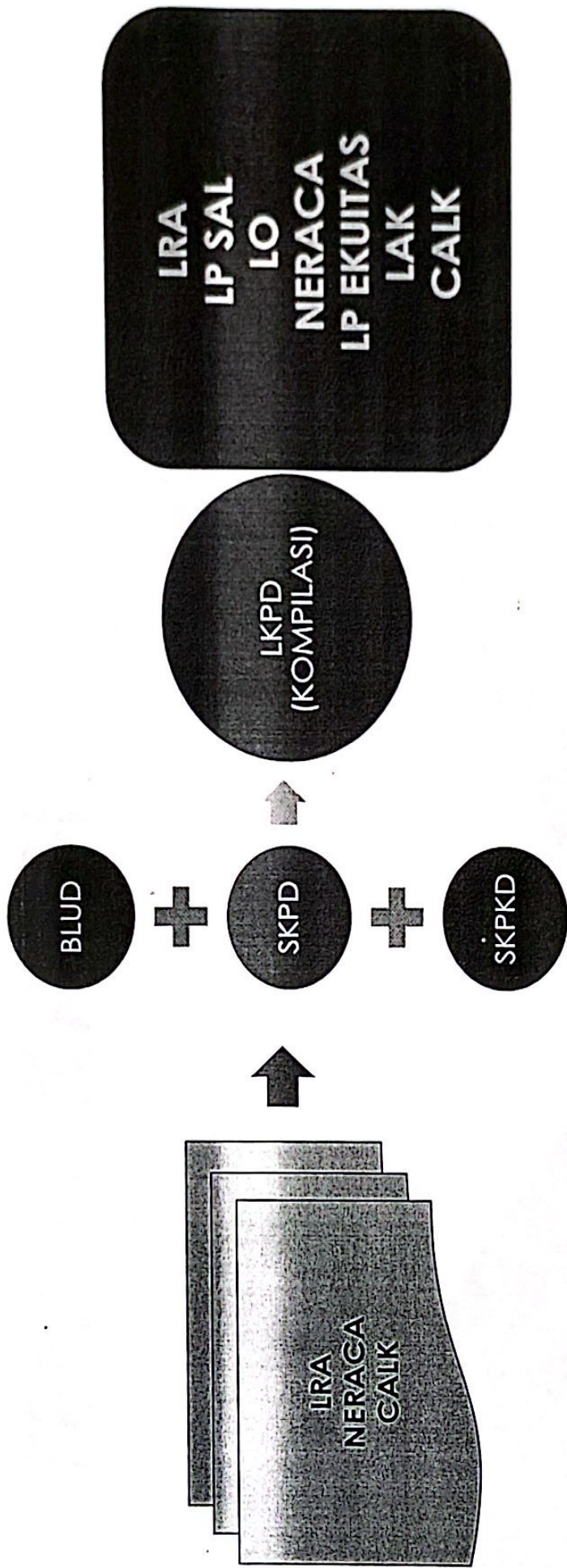
BELANJA

- SEMUA DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI BELANJA MULAI DARI PENYEDIAAN DANA SAMPAI DENGAN BUKTI REALISASI (SPj), HARUS SUDAH DIVERIFIKASI OLEH SATUAN PENGELOLA KEUANGAN (PPK, Petugas Akuntansi, Petgs Verifikasi, Pet P doka, dan bendahara).
- Bendahara Pengeluaran harus memiliki catatan: (buku kas.....)

AKRUAL TRANSANSI (AKRUAL BASIS)



REPORAN KEUANGAN



TERIMA KASIH

DPPKAD KAB BATANG September 2016

**KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
KABUPATEN BATANG**



KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BATANG

Disampaikan Oleh:

Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Batang

Sri Hartini, SE

PsI 1 UU 17/2003

Pendapatan negara/daerah dalam hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

PsI 36 ayat (1) UU 17/2003

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

PsI 70 ayat (2) UU 1/2004

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat 5 tahun (2008)

PP. Nomor 24 Tahun 2005

PP. Nomor 71 Tahun 2010

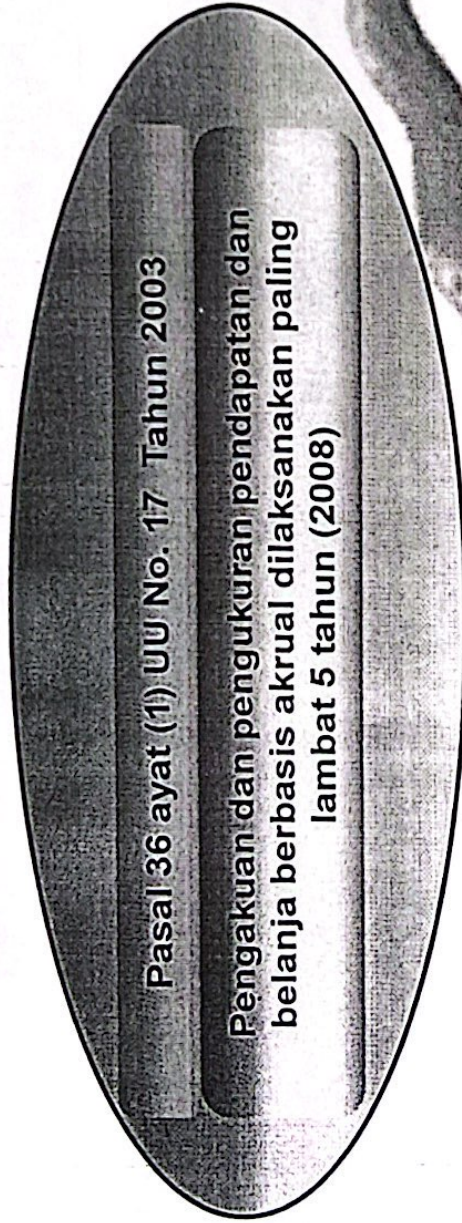
Permendagri No. 64 Th. 2013

Basis Kas

CTA

Basis Akrual

Paling lambat tahun 2015



**LINGKUP PENGATURAN PP 71/2010
(PENJELASAN UMUM)**

**SAP Berbasis Akrual
(Lampiran I)**



**SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
(Lampiran II)**



**berlaku sejak
tanggal ditetapkan
dan dapat segera
diterapkan oleh
setiap entitas**



**berlaku selama masa
transisi bagi entitas
yang belum siap untuk
menerapkan SAP
Berbasis Akrual**

Medijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi PemKab Batang

NO	Kebijakan Akuntansi	NO	Sistem Akuntansi
1.	Peraturan Bupati Batang Nomor 70 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang	1.	Peraturan Bupati Batang Nomor 69 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
2.	Dimaksudkan sebagai dasar pengukuran, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, beban dan pembiayaan .	2.	Mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset , kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan Laporan keuangan SKPD maupun PPKD

Akuntansi Pendapatan LRA

	Kebijakan Akuntansi	Sistem Akuntansi
1.	Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (termasuk Bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan)	Pada saat penerimaan kas , berdasarkan bukti pembayaran atau surat tanda setoran , PPK SKPD mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan LRA dengan jurnal : Perubahan SAL Pendapatan LRA

100000

Akuntansi Pendapatan LO

Kebijakan Akuntansi

Sistem Akuntansi

1. Pendapatan LO diakui pada saat :
 - a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan
 - b. Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari Pendapatan

Pencatatan transaksi :

- a. Pada saat penetapan hak Piutang Pendapatan Pendapatan LO
- b. Pada saat penerimaan kas :
 - Bila lewat Bendahara penerimaan dan diterbitkan bukti penerimaan: Kas di Bendahara penerimaan
Piutang Pendapatan
 - Bila pembayaran langsung ke kas daerah dan diterbitkan STS : R/K PPKD
Piutang Pendapatan

no

Kebijakan Akuntansi

Sistem Akuntansi

- c. Pendapatan LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas :
- Jika diterima oleh Bendahara Penerimaan :
Kas di Bendahara Penerimaan
Pendapatan diterima dimuka
 - Jika disetor langsung ke Kasda :
R/K PPKD
Pendapatan diterima dimuka
 - Jika uang itu sudah menjadi hak Pemda :
Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan LO

Akuntansi Belanja



Kebijakan Akuntansi

Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan yang telah dipertanggungjawabkan

Sistem Akuntansi

Jika pembayaran belanja lewat LS, pada saat penerbitan SP2D LS, maka di jurnal:

Belanja

Perubahan SAL

Jika pembayaran belanja lewat UP, pada saat pengisian kembali kas di Bendahara Pengeluaran (terbit SP2D GU), maka di jurnal

Belanja

Perubahan SAL

Kebijakan Akuntansi

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

Sistem Akuntansi

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas :
Pengakuan beban berdasarkan dokumen sumber berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) / tagihan/dokumen lain yang dipersamakan :
Beban
 Utang beban
2. Beban diakui pada saat pengeluaran kas;
- Jika pakai uang panjar, beban dicatat pada saat PPTK mempertanggungjawabkan uang panjar :
Beban.....
 Panjar kegiatan
- Jika tidak pakai uang panjar, beban dicatat saat bendahara melakukan pembayaran tagihan dari uang persediaan dan dan berdasarkan bukti pembayaran dicatat :
Beban
 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kebijakan Akuntansi

Sistem Akuntansi

3. Beban diakui setelah pengeluaran kas
 - a. Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara Pengeluaran :

luaran :

Beban

Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada saat pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi yang diterbitkan PPK SKPD :

Beban dibayar dimuka

Beban

Kebijakan Akuntansi

Sistem Akuntansi

b. Pencatatan pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung :

- Pada saat adanya tagihan, maka dijournal :
Beban

Utang Beban

- Pada saat PPK SKPD menerima tembusan dokumen pembayaran dari BUD (SP2D LS):

Utang Beban

R/K PPKD

- Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen akuntansi :

- .. Beban dibayar dimuka
Beban

Akuntansi Piutang



Kebijakan Akuntansi	Sistem Akuntansi
<p>a. Piutang diakui pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang piutang; dan/atau telah diterbitkan surat penagihandan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan</p>	<p>a. Pada saat menerima dokumen penetapan pendapatan dan pelunasan belum dilakukan oleh Wajib Pajak/ Retribusi atau pihak ketiga lainnya: Piutang Pendapatan LO</p>
<p>b. Piutang diakui dalam hal terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah seperti seperti peristiwa pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/ jasa oleh Pemda kepada pihak ke 3</p>	<p>b. Pada saat Wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga melakukan pembayaran . - bila lewat bendahara penerimaan : Kas di Bendahara Penerimaan Piutang..... - Bila langsung ke Kasda : R/K PPKD Piutang</p>

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak tertagih
Lancar	Kurang dari 1 Tahun	0,5%
Kurang Lancar	1 tahun dan kurang dari 3 tahun	10 %
Diragukan	3 tahun dan kurang dari 5 tahun	50%

* Macet 5 Tahun / + 100 %

Pada akhir tahun dihitung penyisihan piutang tak tertagih dan dibuat jurnal :
Beban penyisihan piutang
 Penyisihan piutang

Akuntansi Persediaan



Kebijakan Akuntansi

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

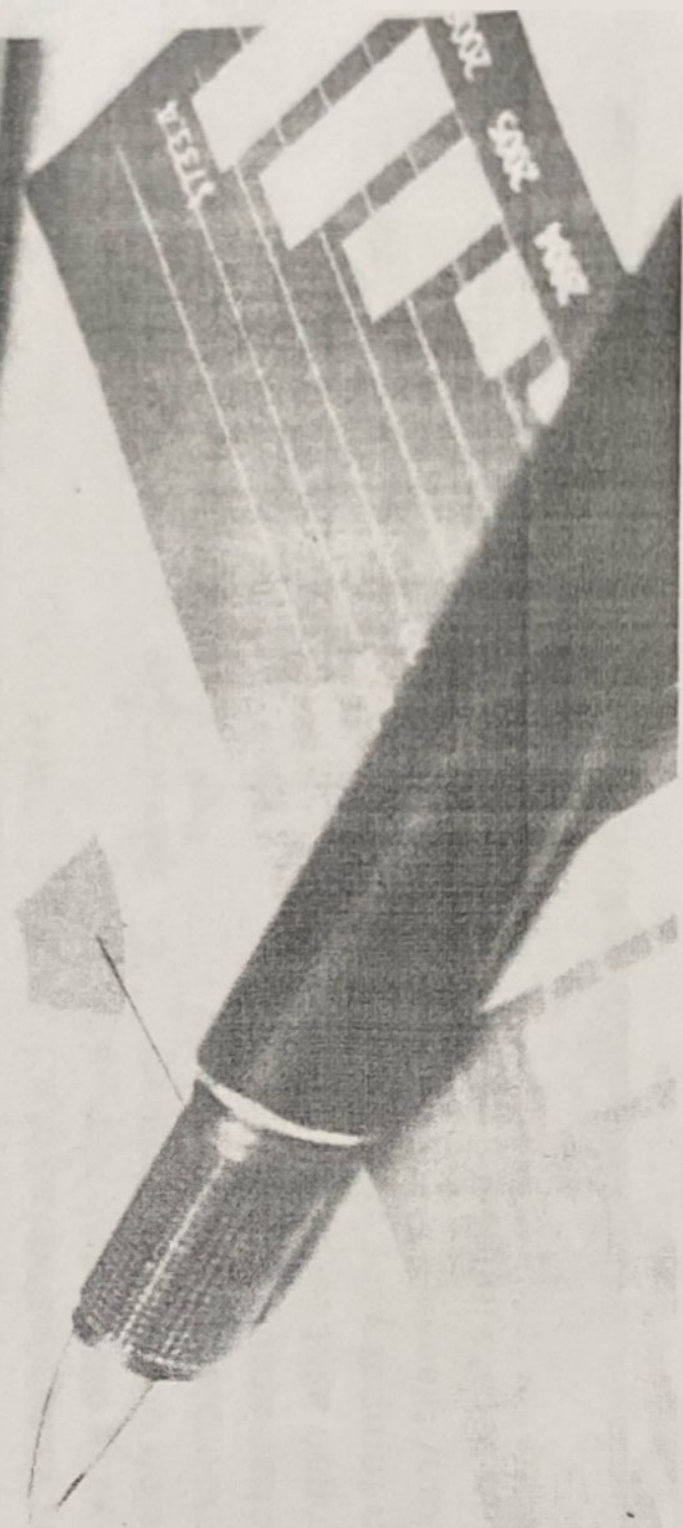
Sistem Akuntansi

- Pada awal tahun, berdasar bukti memorial, PPK – SKPD mencatat pengakuan Beban persediaan dan pengurangan persediaan atas persediaan awal :
 Beban Persediaan
 Persediaan
- Pada waktu pengadaan persediaan ,
 a. jika dg mekanisme UP :
 Beban Persediaan
 Kas di Bendahara Pengeluaran
- b. Jika dg mekanisme LS
 Beban Persediaan
 Utang Beban
 Utang Beban
 R/K PPKD

Akuntansi Persediaan

	Kebijakan Akuntansi	Sistem Akuntansi
		<p>c. Pada Akhir Tahun : Berdasarkan tembusan berita acara hasil stock opname fisik persediaan : Persediaan Beban Persediaan</p>

5
13.000.000
6.500.000
1.960.000
7.336.223
1.875.769



Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan (yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan/ biaya yg diatribusikan secara langsung

Sistem Akuntansi

- a. Pencatatan Aset Tetap tanpa termin berdasarkan BAST/Tagihan / Dokumen lain :
Aset Tetap
 Utang Pengadaan Aset Tetap

Pada saat terbit SP2D :
Utang Pengadaan Aset Tetap
 R/K PPKD

- b. Bila dengan Termin :
 - Pada saat ada tagihan belanja modal termin :
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 Utang Pengadaan Aset Tetap
 - Pada saat terbit SP2 D :
 Utang pengadaan Aset Tetap
 R/K PPKD

Kebijakan Akuntansi

Sistem Akuntansi

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung :

- a. Biaya persiapan tempat
- b. Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat
- c. Biaya pemasangan
- d. Biaya profesional
- e. Biaya konstruksi
- f. Biaya kepanitiaan

Biaya yang tidak dapat diatribusikan

Secara langsung :

- a. Honor PPTK
- b. Biaya administrasi dan umum lainnya
- c. Biaya permulaan dan pra produksi seperti survey

- Jika sudah 100% :

- Konstruksi dalam pengerjaan
- Utang Pengadaan Aset Tetap
 - Pada saat SP2D terbit :
 - Utang Pengadaan Aset Tetap R/K PPKD
 - Untuk mengakui Aset Tetap :
 - Aset Tetap
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan
- b. Perolehan melalui Hibah/Donasi :
Aset Tetap
Pendapatan Hibah - LO

c. Pelepasan Aset Tetap

- Penghapusan Aset Tetap
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Defisit penjualan aset non lancar-LO
- Aset Tetap
- Jika dijual ($HJ < NB$) ;
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Defisit penjualan aset non lancar – LO
- Aset Tetap
- Jika dijual ($HJ > NB$) ;
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Surplus penjualan Aset non lancar-LO
- Aset Lancar

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan Aset Tetap adalah metode garis lurus :

Penyusutan per periode =

Nilai Perolehan

Masa Manfaat

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan Aset Tetap dicatat setiap akhir periode pelaporan, dengan jurnal :

Beban penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi

Sistem Akuntansi

Aset Lainnya adalah aset

Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan penjualan angsuran
- b. Tuntutan Perbendaharaan
- c. Tuntutan Ganti Rugi
- d. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- e. Aset Tak berwujud
- f. Aset Lain-lain

- Aset tak berwujud,

- a. Jika penganggarnya lewat barang dan jasa, maka jurnal koreksi pengakuan Aset Tak Berwujud Aset Tak berwujud
Beban Barang dan Jasa
- b. Jika dianggarkan pada Belanja Modal, Aset tak berwujud
Aset Tetap

-Tagihan Penjualan Angsuran

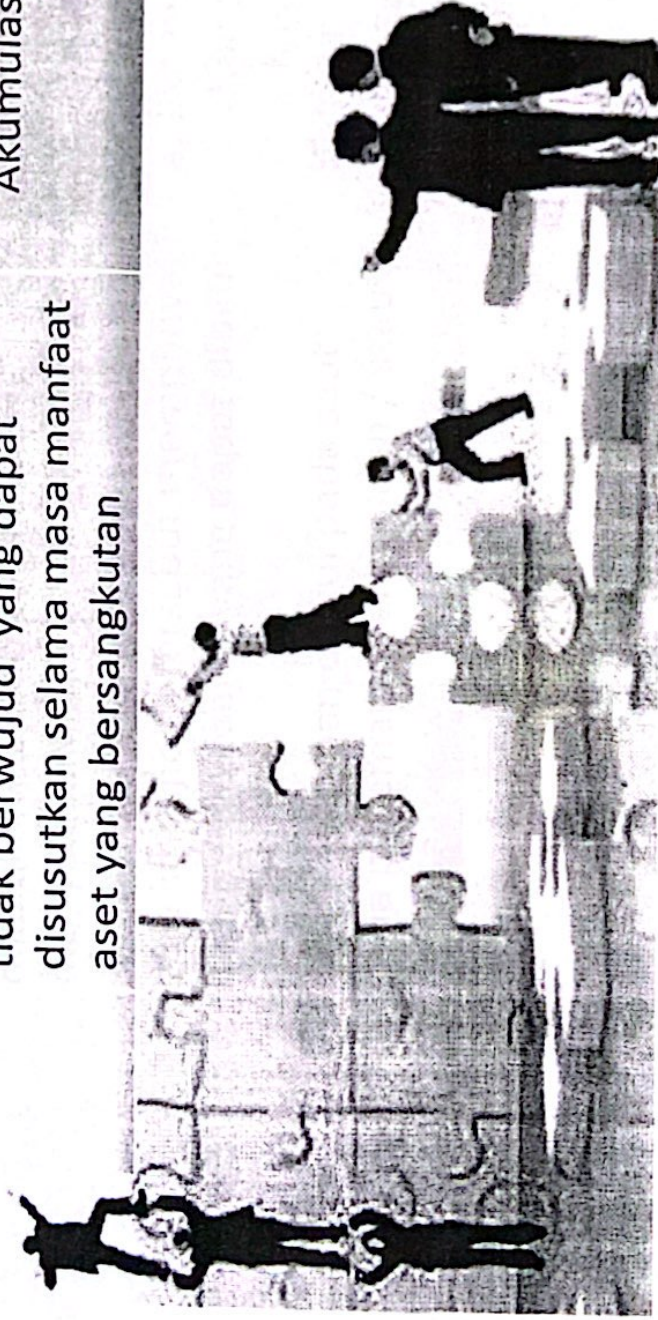
- a. Jika harga jual > Nilai buku
Tagihan Penjualan Angsuran
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Surplus penjualan Aset Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Rusak Berat.

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain,

**Akumulasi amortisasi :
Beban Amortisasi
Akumulasi Amortisasi**

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan



Akuntansi Kewajiban



a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal

b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan / atau pada saat kewajiban timbul.

-Jika melakukan transaksi pembelian dengan menanggukhan pembayaran, maka jurnalnya :

Beban

Utang Beban

-Pada saat melakukan pembayaran :

a. Jika menggunakan UP :

Utang

Kas di Bendahara pengeluaran

b. Jika melalui LS :

Utang

R/K PPKD

Akuntansi Ekuitas

Kebijakan Akuntansi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan

Sistem Akuntansi

Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, setelah menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun-akun nominal dengan tujuan :

- a. Menghitung jumlah surplus/defisit dari akun pendapatan LO dan beban
- b. Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas untuk pencatatan periode sebelumnya
- c. Menghitung ekuitas akhir periode

Contoh jurnal penutup LO :

Pendapatan – LO

Beban

Surplus/Defisit – LO

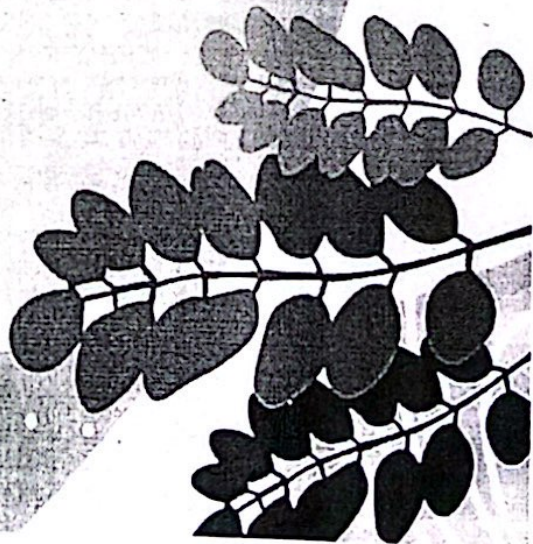
Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun surplus (Defisit) – LO ke akun ekuitas.

Berikut contoh jurnal penutup akhir periode :

Surplus/Defisit – LO

Ekuitas

TERIMA KASIH



REVIEW DRAFT LKPD

REVIEW DRAF LKPD

OLEH:

INSPEKTORAT

PENGERTIAN REVIU LKPD

- penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD oleh inspektorat
- untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa:
 - akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 - LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas

TUJUAN REVIU LKPD

- Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD,**
- Memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.**

RUANG LINGKUP REVIU LKPD

- **Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi**
 - Untuk menilai apakah penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAPD yang dibangun
 - Penelaahan dimulai dari LK, catatan akuntansi, sampai dengan dokumen sumber
- **Penelaahan atas penyajian LKPD**
 - Penelaahan dengan membandingkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pos/rekening dalam LKPD dengan SAP sebagaimana dituangkan dalam kebijakan akuntansi
 - Dilakukan terhadap kelompok transaksi

OBYEK REVIU LKPD

Laporan keuangan yang disusun oleh penda yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
7. Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN POKOK

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Kelompok	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	3. Laporan Operasional (LO) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5. Neraca 6. Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

**BASIS AKUNTANSI
PADA LAPORAN KEUANGAN**

Basis Akuntansi	Laporan Keuangan
Kas	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan SAL (LPSAL) - Laporan Arus Kas (LAK)
Akrual	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Operasional (LO) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Neraca

DATA DUKUNG LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan triwulan /semesteran
2. Hasil audit atas laporan keuangan tahun sebelumnya
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab.
4. Rekap LRA dan keterangannya.
5. Penjabaran LRA.
6. Daftar Mutasi Aset Tetap Kertas Kerja Akuntansi.
7. Lampiran Aset Lancar (Daftar piutang, Daftar Persediaan).
8. Rekap Potongan dan Setoran Pajak.
9. Surat Ketetapan Retribusi
10. STS Contra Pos dan Kas diBendahara



- 11. Rekap Belanja Modal**
- 12. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan BKU bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran**
- 13. Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.**
- 14. Data Retensi 5% (Pemeliharaan) Kegiatan .**
- 15. Daftar Belanja Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya kurang dari Rp.500.000,- dan dianggarkan dalam belanja modal.**
- 16. Daftar Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilai per unitnya lebih dari Rp.20.000.000,- dan tidak dianggarkan pada rekening belanja modal.**

17. **Daftar nilai perolehan aset yang tidak dianggarkan pada rekening belanja modal.**
18. **Daftar belanja modal (barang dan jasa) yang dihibahkan.**
19. **Copy rekening koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2015.**
20. **Berita Acara Stock Opname Persediaan.**
21. **Daftar Inventarisasi Barang**
22. **Daftar Mutasi Barang dan KIB per 31 Desember 2015.**
23. **jurnal Penerimaan/pendapatan**
24. **Jurnal Pengeluaran/Belanja**
25. **Buku besar pendapatan**
26. **Buku besar pengeluaran/belanja**

BATANG

PENGECUALIAN PADA NERACA :

1. Nilai aset tetap berbeda dengan nilai Kartu Inventaris Barang (KIB)
2. Metode perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan belum diberlakukan secara konsisten, khususnya atas kapitalisasi aset
3. Tanah SD Negeri pada Kelurahan eks desa belum dinilai
4. Aset Tetap bersumber dari dana BOS, Block Grant dan Komite tidak terdata secara lengkap

PENGECUALIAN PADA LAPORAN OPERASIONAL (LO) :

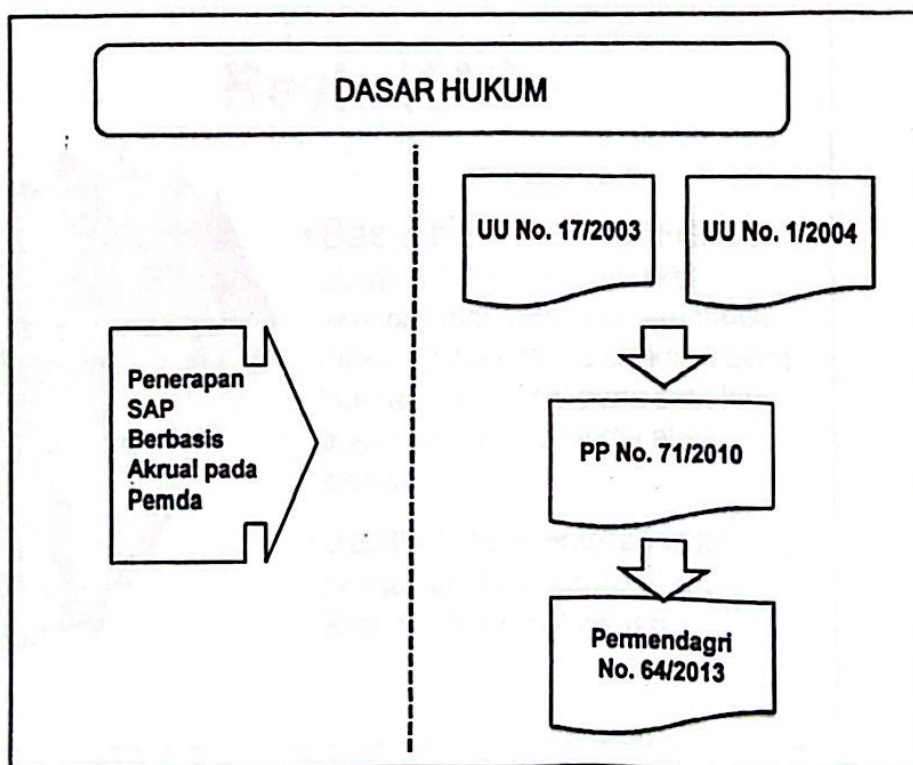
- 1. Pendapatan Hibah LO – dari dana BOS, Block Grant dan Komite sekolah tidak didukung data yang memadai dan nilainya berbeda dengan data DISDIKPOR**
- 2. Beban hibah dari BOS, Block Grant dan Komite tidak dapat dirinci berdasarkan jenis beban serta belum dikurangi dengan nilai aset tetap yg dihasilkan**
- 3. Pendapatan hibah dan beban hibah yang berasal dari komite belum disajikan di Laporan Operasional (LO)**
- 4. Sisa Kas dari dana BOS per 31 Desember 2015 belum disajikan dalam akun Kas Lainnya di Neraca**

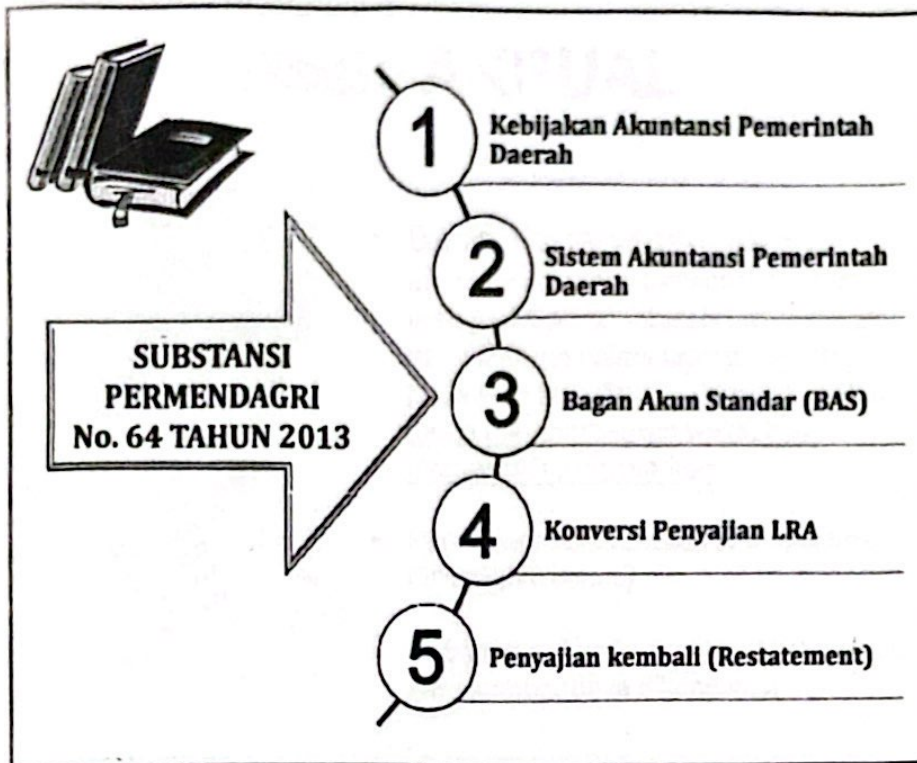
TERIMA KASIH



**PELATIHAN SIMDA 2.7 BERBASIS
AKRUAL**

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL





Basis KAS

- **Basis Kas** adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
- **Basis Kas** diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan

Basis AKRUAL



- Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
- Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (*earned*)
- Beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

LAPORAN KEUANGAN PEMDA

BASIS KAS (Lama)	BASIS AKRUAL (Baru)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Laporan Arus Kas (LAK)	3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5. Neraca
	6. Laporan Arus Kas (LAK)
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi	Laporan Keuangan
Akrual	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Operasional (LO) - Neraca - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Kas	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Perubahan SAL (LPSAL) - Laporan Arus Kas (LAK)

7

LAPORAN KEUANGAN SKPD

BASIS KAS (Lama)	BASIS AKRUAL (Baru)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 4. Neraca 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
4	PENDAPATAN - LRA				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA				
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA				
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA				
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA				
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	Belanja Pegawai				
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa				
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	Belanja Modal Tanah				
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
	SESA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

..... 31 Desember 20X1
Jabatan Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi :

NO. URUT	URAIAN	20X1	20X0	RENAKAR/ (PENURUBAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO				
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO				
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
9	BEBAN				
9.1	BEBAN OPERASI				
9.1.1	Beban Pegawai				
9.1.2	Beban Barang dan Jasa				
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang				
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

.....31 Desember 20X1
Jabatan Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD
NIP Kepala SKPD

NERACA PEMERINTAH KABUPATEN		
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pendapatan		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
JUMLAH ASET LANCAR		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang Permanen		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
JUMLAH ASET TETAP		
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
JUMLAH DANA CADANGAN		
ASET LAINNYA		
JUMLAH ASET LAINNYA		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBYAKANN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

NO	Akun	Anggaran	Realisasi
I.	Pendapatan-LRA	140	160
II.	Belanja	(100)	(90)
III.	Transfer	(15)	(15)
IV.	Surplus/Defisit (I - II - III)	25	55
V.	Penerimaan Pembiayaan	15	15
VI.	Pengeluaran Pembiayaan	(40)	(35)
VII.	Pembiayaan Netto (V - VI)	(25)	(20)
VIII.	SAL/SILPA (Tahun Berjalan) (IV + VII)	0	35

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

I.	SAL/SILPA (Awal)	10
II.	Penggunaan SAL/SilPA (Tahun Sebelumnya) (sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan)	(10)
III.	SAL/SILPA (Tahun Berjalan)	35
IV.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	1
V.	Lain-lain	0
IV.	SAL/SILPA (Akhir) (I - II + III +IV+V)	36

Laporan Operasional

I.	Pendapatan - LO	145
II.	Beban	75
III.	Surplus/Defisit Operasional (I - II)	70
IV.	Kegiatan Non Operasional	20
V.	Pos Luar Biasa	(5)
VI.	Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)	85

Laporan Perubahan Ekuitas

I.	Ekuitas Awal	350
II.	Surplus/Defisit - LO	85
III.	Ekuitas Akhir (I - II)	435

Neraca

I.	Aset	515
II.	Kewajiban dan Ekuitas	515
	1. Kewajiban	80
	2. Ekuitas	435

BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

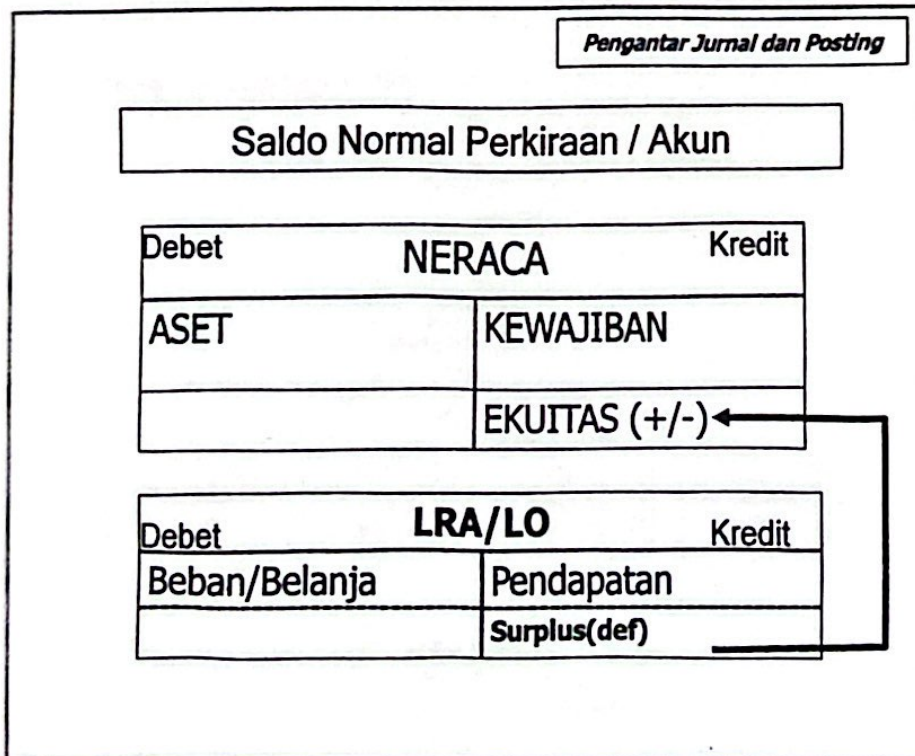
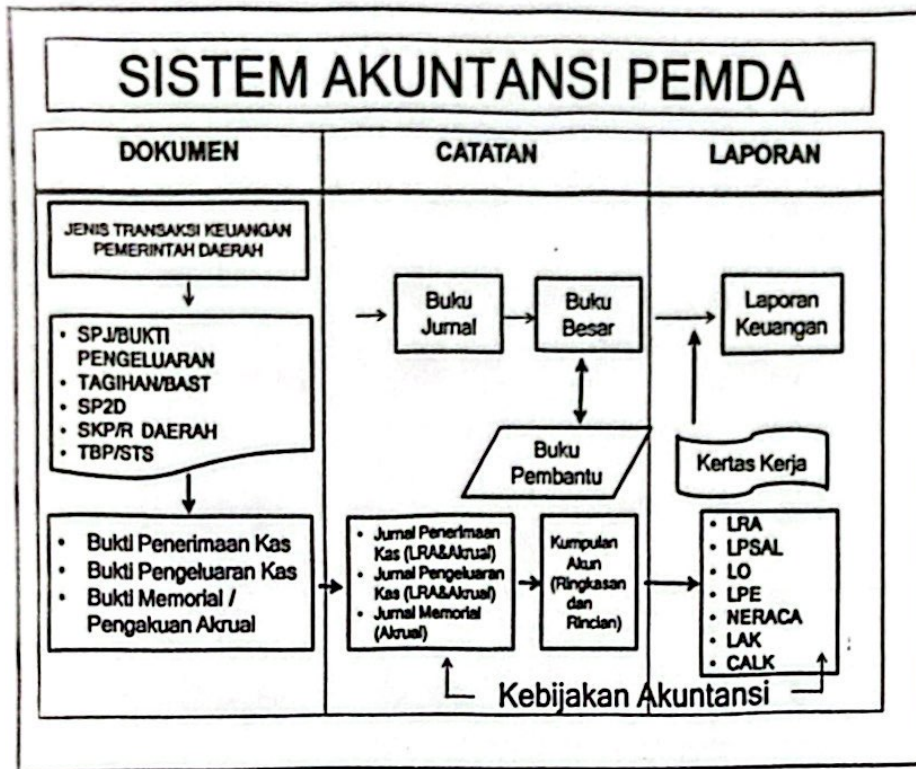
Pengelompokan akun dalam BAS ini disesuaikan dengan jenis laporan yang akan dihasilkan dalam Akuntansi Berbasis Akrual.

PENGELOMPOKKAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS)

Kode Akun	Nama Akun
1	ASET
2	KEWAJIBAN
3	EKUITAS
4	PENDAPATAN - LRA
5	BELANJA
6	TRANSFER
7	PEMBIAYAAN
8	PENDAPATAN - LO
9	BEBAN

METODE PENCATATAN

- Dilakukan dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas.
- Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan **Perubahan SAL**.

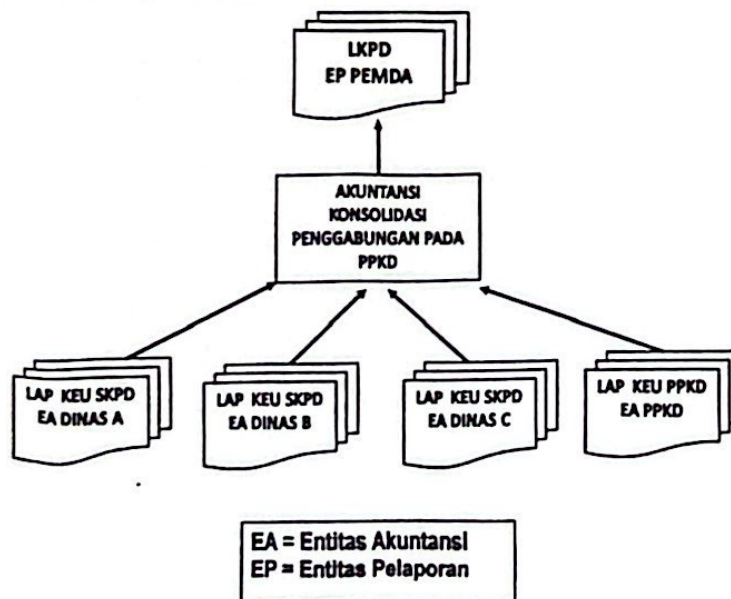


Pengantar Jurnal dan Posting

Saldo NORMAL Perkiraan / Akun

Jenis Perkiraan/Akun	Tambah	Kurang	SALDO NORMAL
1. ASET	DEBET	Kredit	Debet
2. BELANJA/BEBAN	DEBET	Kredit	Debet
3. Kewajiban/ Hutang	Kredit	Debet	Kredit
4. Ekuitas	Kredit	Debet	Kredit
5. Pendapatan	Kredit	Debet	Kredit

KONSOLIDASI LKPD



TERIMA KASIH

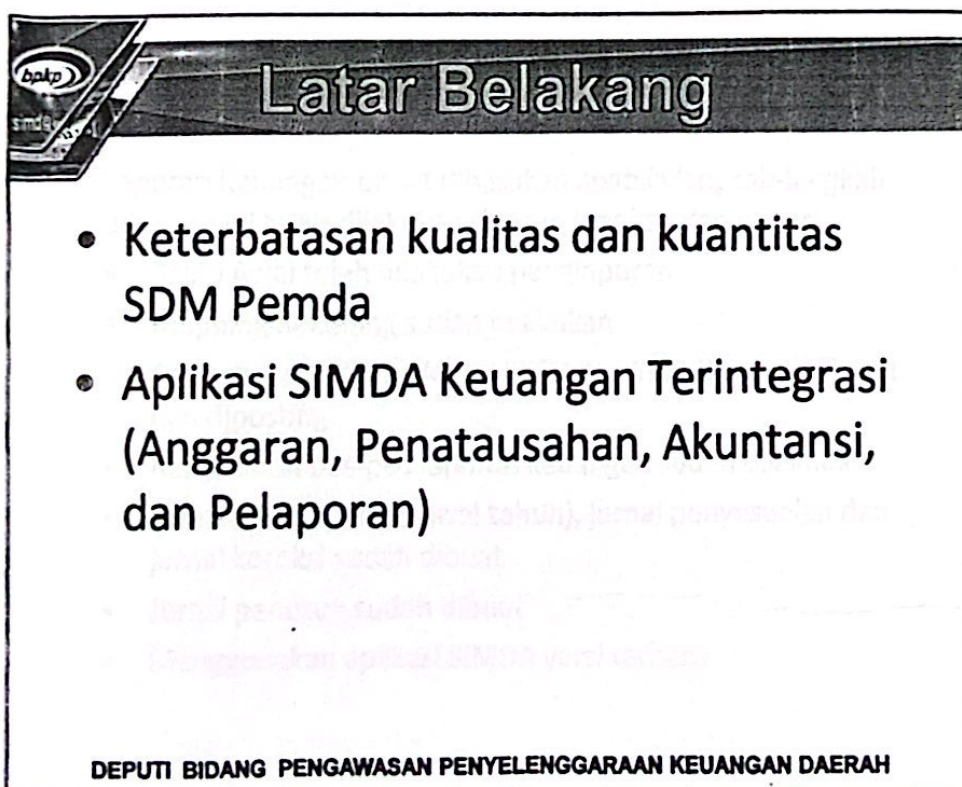
Menyatakan terima kasih atas
SMA Perintis
Kegiatan SMA Perintis dan Perintis
Pengertian, Peran, Fungsi, dan
dan (SMA Perintis)



**PERLAKUAN
AKUNTANSI AKRUAL**

SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7

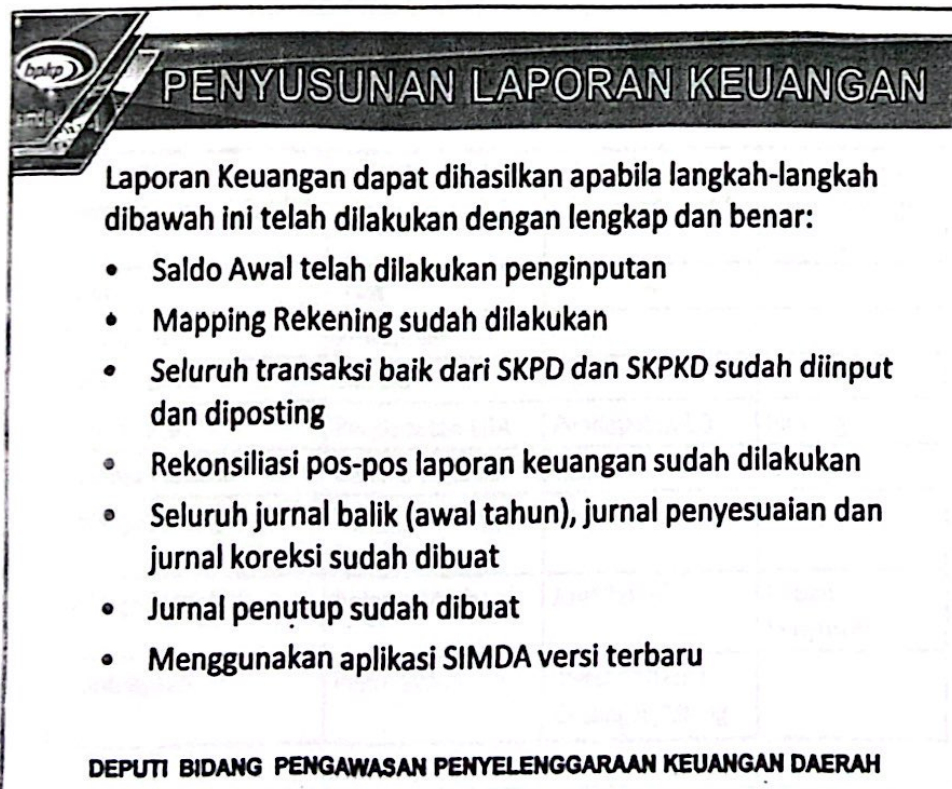
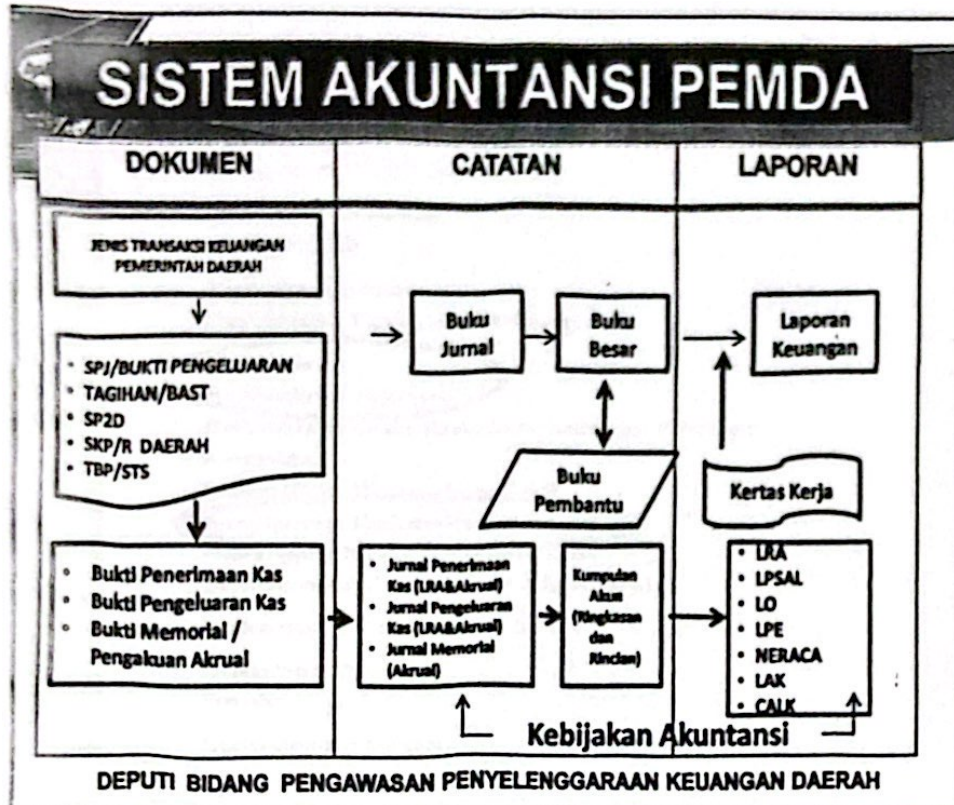
Accounting Treatment

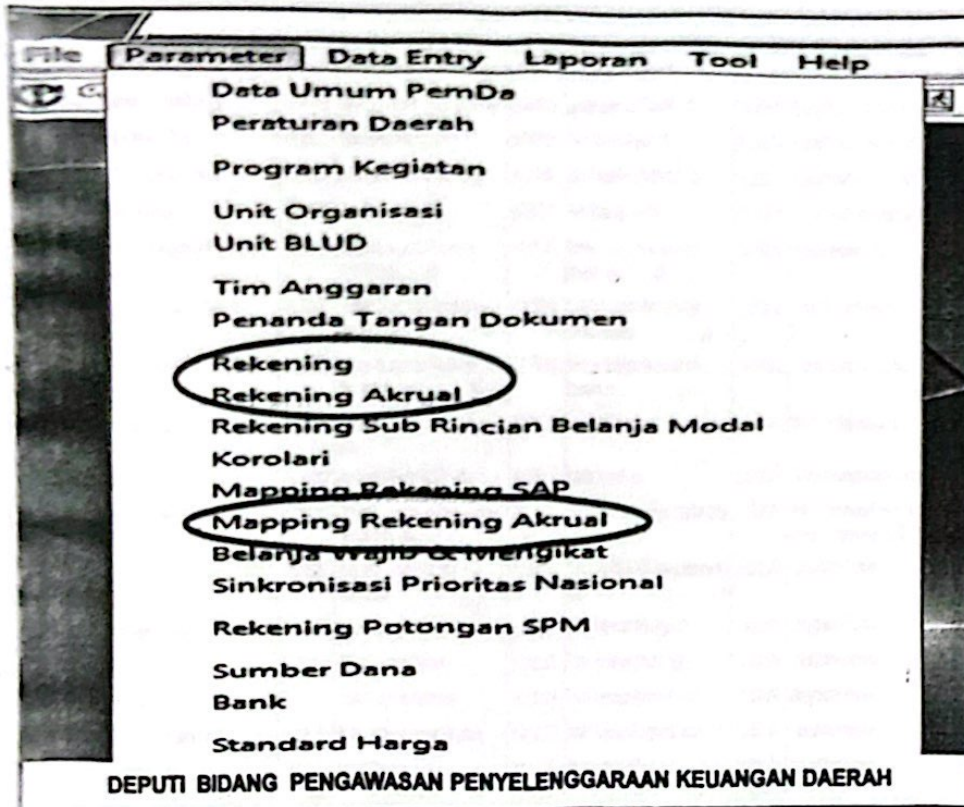


Latar Belakang

- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pemda
- Aplikasi SIMDA Keuangan Terintegrasi (Anggaran, Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH





MAPPING BAS Akrual

Rekening I Permendagri 13/59/21	Rekening II Permendagri 64	Mapping I Permendagri 64	Mapping II Permendagri 64
Aset	Aset	--	--
Kewajiban	Kewajiban	--	--
Ekuitas Dana	Ekuitas	--	--
Pendapatan	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Piutang
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Beban	Utang
Belanja Barang & Jasa	Belanja Barang & Jasa	Beban	Utang
Belanja Modal	Belanja Modal	Aset Tetap	Beban Penyusutan
Pembiayaan	Pembiayaan	Investasi/Dana Cadangan/Utang	--

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

4.1.01.01	Dana Pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat	4.1.01.01	Dana Pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat -DA	4.1.01.01	Dana Pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat -LO	1.1.01.01	Piutang Transfer Dana Penjualan
4.1.01.02	Bantuan Operasional Sekolah	4.1.01.02	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) -DA	4.1.01.02	Bantuan Operasional Sekolah -LO	1.1.01.02	Piutang Transfer Dana Penjualan
4.1.01.03	Dana Darurat Khusus	4.1.01.03	Dana Darurat Khusus -DA	4.1.01.03	Dana Darurat Khusus -LO	1.1.01.03	Piutang Transfer Dana Darurat Khusus
4.1.01.04	Dana Transfer Infrastruktur	4.1.01.04	Dana Transfer Infrastruktur -DA	4.1.01.04	Dana Transfer Infrastruktur -LO	1.1.01.04	Piutang Transfer Dana Darurat Khusus
4.1.01.05	Dana Restorasi	4.1.01.05	Dana Restorasi -DA	4.1.01.05	Dana Restorasi -LO	1.1.01.05	Piutang Transfer Dana Restorasi
4.1.50.01	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi ... -DA	4.1.50.01	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi ... -DA	4.1.50.01	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi ... -LO	1.1.50.01	Piutang Perantara Lainnya ..
4.1.50.02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten ..	4.1.50.02	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten .. -DA	4.1.50.02	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten .. -LO	1.1.50.02	Piutang Perantara Lainnya ..
4.1.50.03	Bantuan Keuangan Dari Kota ..	4.1.50.03	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kota .. -DA	4.1.50.03	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kota .. -LO	1.1.50.03	Piutang Perantara Lainnya ..
4.1.60.01	Perantara Lainnya	4.1.60.01	Perantara Lainnya Pihak Ketiga -DA	4.1.60.01	Perantara Lainnya -LO	1.1.60.01	Piutang Perantara Lainnya ..
4.1.60.02	Komite Sekolah	4.1.60.02	Perantara Komite Sekolah -DA	4.1.60.02	Komite Sekolah -LO	1.1.60.02	Piutang Perantara Komite Sekolah
4.1.60.03	Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS)	4.1.60.03	Perantara Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) -DA	4.1.60.03	Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS) -LO	1.1.60.03	Piutang Perantara Sumbangan Pengembangan Sekolah (SPS)
5.1.10.01	Gaj. Pokok PNS/ASN & Wakil KN/Utang Representasi DPRD	5.1.10.01	Belanja Gaj. Pokok PNS/Utang Representasi	5.1.10.01	Beban Gaj. Pokok PNS / Utang Representasi -LO	2.1.50.01	Utang. Beban Pegawai
5.1.10.02	Tunjangan Keluarga	5.1.10.02	Belanja Tunjangan Keluarga	5.1.10.02	Beban Tunjangan Keluarga -LO	2.1.50.02	Utang. Beban Pegawai
5.1.10.03	Tunjangan Jabatan	5.1.10.03	Belanja Tunjangan Jabatan	5.1.10.03	Beban Tunjangan Jabatan -LO	2.1.50.03	Utang. Beban Pegawai
5.1.10.04	Tunjangan Fungsional	5.1.10.04	Belanja Tunjangan Fungsional	5.1.10.04	Beban Tunjangan Fungsional -LO	2.1.50.04	Utang. Beban Pegawai
5.1.10.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.1.10.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	5.1.10.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum -LO	2.1.50.05	Utang. Beban Pegawai
5.1.10.06	Tunjangan Bersih	5.1.10.06	Belanja Tunjangan Bersih	5.1.10.06	Beban Tunjangan Bersih -LO	2.1.50.06	Utang. Beban Pegawai



Perlakuan Akuntansi SIMDA Keu Versi 2.7

1. Pengakuan Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan
2. Pengakuan Pendapatan LO
3. Pengakuan Beban Operasional
4. Pengakuan Aset Tetap
5. Perhitungan Akumulasi Aset Tetap
6. Jurnal atas transaksi keuangan Lainnya

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengakuan-Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan

Pengakuan dan pencatatan pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan yang basisnya kas dilakukan pada saat terbitnya dokumen penerimaan dan pengeluaran kas

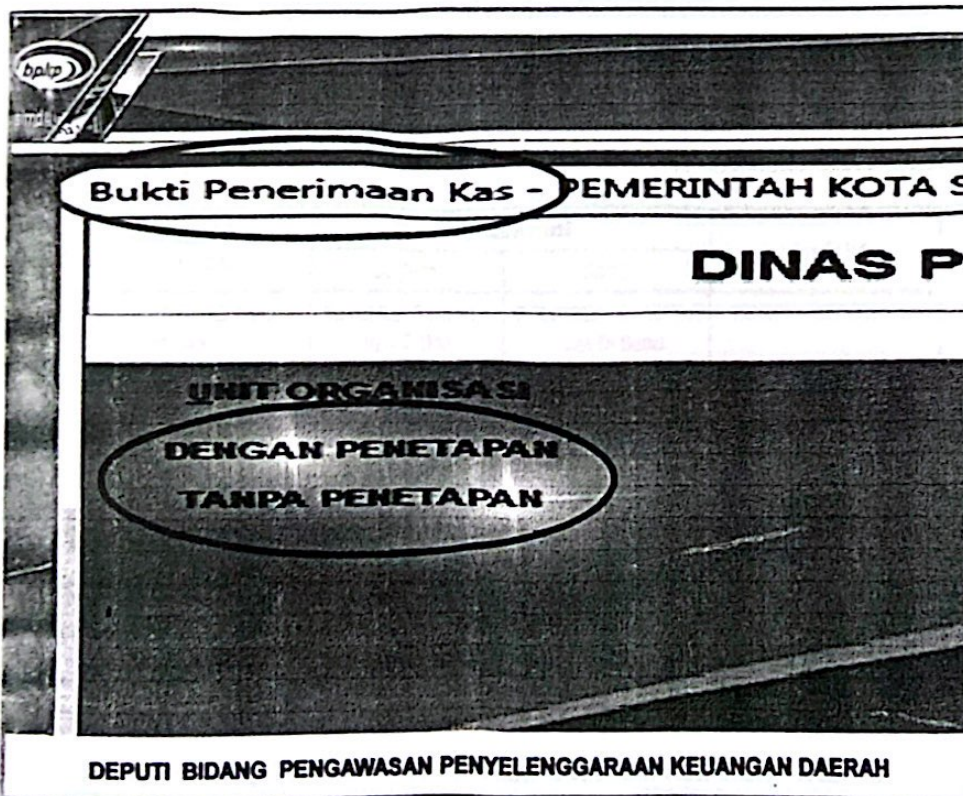
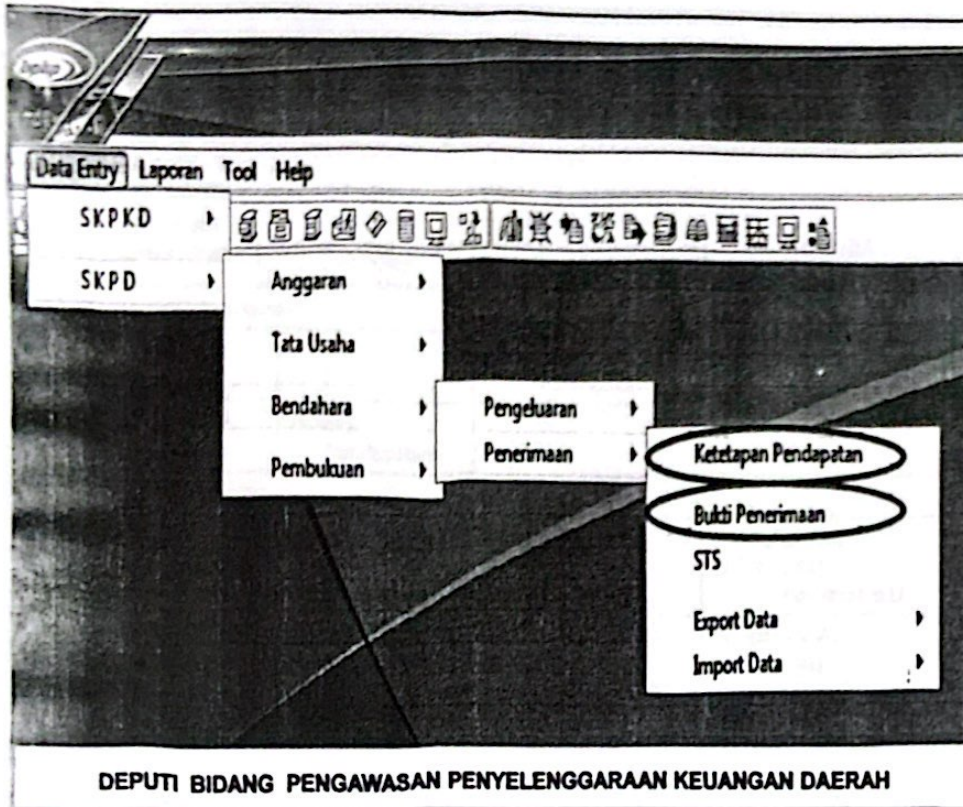
- Pendapatan LRA diakui pada tanggal STS (langsung KASDA) atau Bukti Penerimaan (Bendahara Penerimaan) yang dibuat/diinputkan pada aplikasi
- Penerimaan Pembiayaan diakui pada tanggal diterima dan dicatat melalui jurnal entry pada aplikasi
- Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada tanggal SP2D GU, LS atau SP2D Nihil yang dibuat/diinputkan/diterbitkan pada aplikasi

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

2. Pengakuan Pendapatan LO

- **Dengan Penetapan (Official / Transfer - bila penetapan diakui sebagai dasar pengakuan)**
 - Pendapatan LO diakui pada saat tanggal dokumen penetapan (harus diinputkan dalam aplikasi)
 - Maka pada saat pelunasan atas penetapan ybs dicatat sebagai pelunasan piutang
- **Tanpa Penetapan (Self Assesment / Transfer - bila penetapan tidak/belum diakui sebagai dasar pengakuan)**
 - Pendapatan LO diakui pada saat kas diterima berdasarkan dokumen STS atau Bukti Penerimaan

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH



JURNAL PENGAKUAN PENDAPATAN LO				
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
1	Dokumen Penetapan			
	a) PAD		Piutang Pendapatan LO	
	b) Pendapatan Transfer	Piutang Pendapatan LO		
2	Bukti Penerimaan			
	a) Dengan Penetapan		Kas Di Bendahara Penerimaan Piutang ...	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA
	b) Tanpa Penetapan		Kas Di Bendahara Penerimaan Pendapatan LO	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN PENDAPATAN LO				
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
3	STS oleh Bendahara Penerimaan	Kas di Kas Daerah R/K SKPD	R/K PPKD Kas Di Bend. Penerimaan	
4	WP Langsung Setor Ke Kasda			
	a) Dengan Penetapan	Kas di Kas Daerah R/K SKPD	R/K PPKD Piutang	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA
	b) Tanpa Penetapan	Kas di Kas Daerah R/K SKPD	R/K PPKD Pendapatan LO	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA

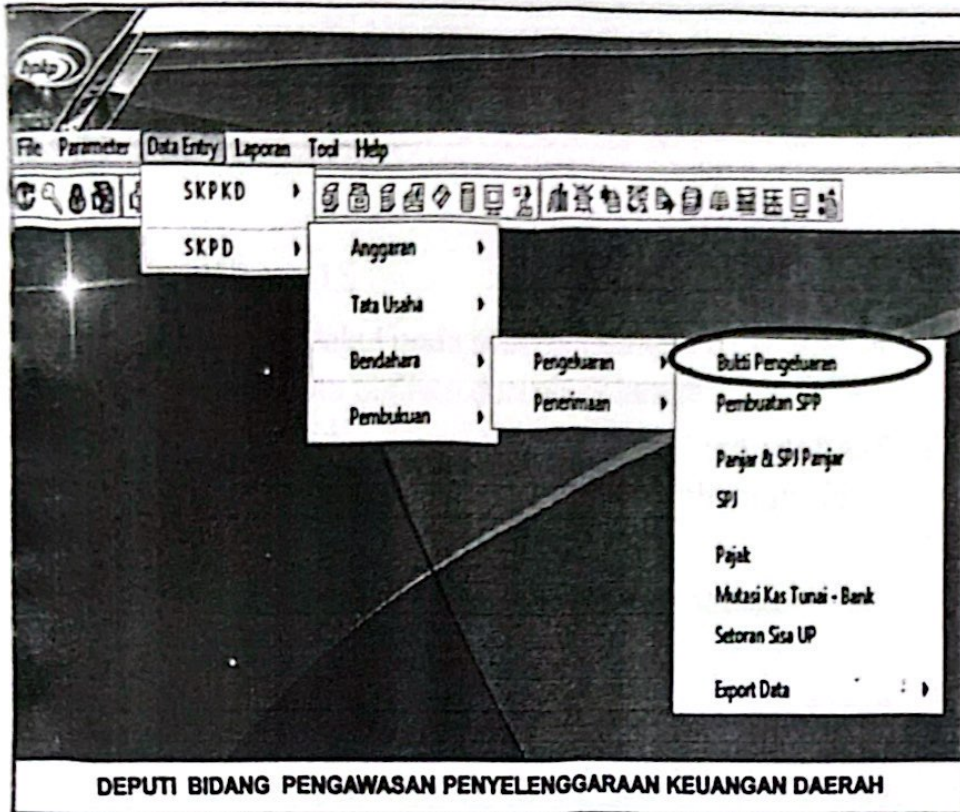
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN PENDAPATAN LO				
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
5	Apabila Pendapatan diinput langsung oleh BUD tanpa melalui SKPD (Menu Penerimaan Pendapatan di BUD)			
	a) Dengan Penetapan			
	1) PAD	Kas di Kas Daerah R/K SKPD	R/K PPKD Piutang	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA
	2) Pendapatan Transfer	Kas di Kas Daerah Piutang		Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA
	b) Tanpa Penetapan	Kas di Kas Daerah R/K SKPD	R/K PPKD Pendapatan LO	Perubahan SAL (7.3.4.01.01) Pendapatan LRA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

3. Pengakuan Beban Operasional	
<input type="checkbox"/>	<p>Mekanisme Uang Persediaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beban diakui pada saat barang dan jasa dibeli berdasarkan tanggal bukti pembayaran (input Bukti Pengeluaran) ▪ Bukti yang diinputkan pada menu "Bukti Pengeluaran" adalah bukti yang sudah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL SIMDA – MEKANISME UPI/GUTU -

LO — SAAT INPUT BUKTI PENGELUARAN (sesuai tgl bukti pembayaran)

9.1.01.XX	Beban ...	XXX
9.1.01.XX	Beban ...	XXX
9.1.01.XX	Beban ...	XXX
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

3. Pengakuan Beban Operasional

- Mekanisme LS

1. Beban diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima tagihan dari pihak ketiga
2. Caranya dengan melakukan input Tagihan/ BAST pada Menu Tagihan pada saat Pembuatan SPP-LS
3. Pada saat SP2D terbit maka diakui sebagai pembayaran utang belanja

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Menu TAGIHAN

Adanya Pilihan Jenis Tagihan, yaitu :

1. Belanja Operasional (Rek Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Rek Belanja Tidak Langsung)
2. Belanja Modal Tanpa Termin (Rek Belanja Modal)
3. Belanja Modal Termin (Rek Belanja Modal)
4. Belanja Modal Termin Terakhir (Rek Belanja Modal)
5. Pembiayaan (Rek Pengeluaran Pembiayaan)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Detail Nomor Tagihan

No. Tagihan 939/007/TGHN-LS/DIKPORA/II/2015

Tanggal Tagihan 03-Feb-2015

Jenis Tagihan 1 Belanja Operasional

Uraian

- 1 Belanja Operasional
- 2 Belanja Modal Non Termin
- 3 Belanja Modal Termin
- 4 Belanja Modal Termin Terakhir
- 5 Pembiayaan

Tutup

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN BEBAN				
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
1	Tagihan/Berita Acara Belanja Operasional (Belanja Pegawai/ Barang Jasa)		Beban ... Utang Beban ...	
	Saat SP2D LS (Belanja Operasional)	R/K SKPD Kas di Kas Daerah	Utang Beban R/K PPKD	Belanja ... Perubahan SAL (7.3.4.01.01)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Pengakuan Aset Tetap

- Pengadaan Aset Tetap Tanpa Termin (dg mekanisme pembayaran langsung /LS)
 1. Aset Tetap diakui pada saat tanggal BAST atau Tagihan dari pihak ketiga (pada saat Pembuatan SPP harus input informasi BAST/Tagihan)
 2. Pada Saat SP2D atas SPP yang bersangkutan terbit maka dianggap sebagai pembayaran utang belanja

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN BELANJA MODAL

No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal AkruaI		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
2	Tagihan/Berita Acara Belanja Modal			
	a) Belanja Modal Tanpa Termin (Misal beli printer, laptop dll)		Aset Tetap Utang Pengadaan Aset Tetap ...	
	b) Saat SP2D LS (Belanja Modal)	R/K SKPD Kas di Kas Daerah	Utang Pengadaan Aset Tetap ... R/K PPKD	Belanja Modal Perubahan SAL (7.3.4.01.01)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Pengkakuan Aset Tetap

- Pengadaan Aset Tetap Dengan Termin (dg mekanisme pembayaran langsung /LS)
 - diakui sebagai KDP pada saat tanggal BAST atau Tagihan dari pihak ketiga (pada saat Pembuatan SPP harus input informasi BAST/Tagihan)
 - Pada Saat SP2D atas SPP yang bersangkutan terbit maka dianggap sebagai pembayaran utang belanja
 - Pada saat termin terakhir berdasarkan BAST maka KDP dipindahkan ke Aset Tetap

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN BELANJA MODAL

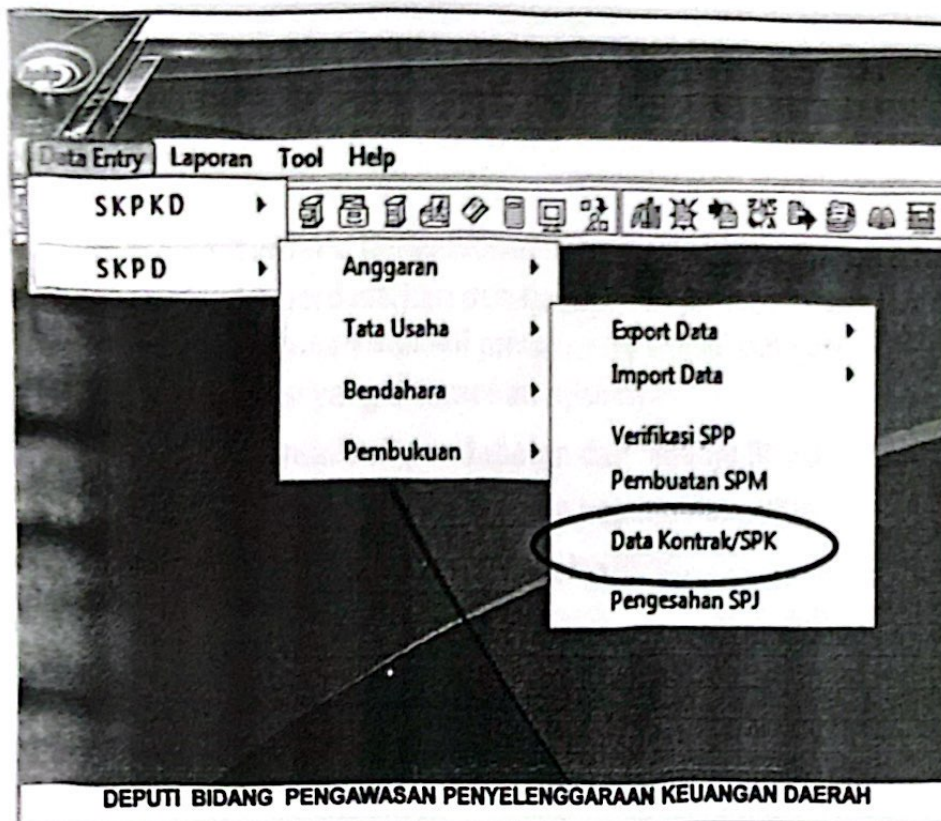
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
2	Tagihan/Berita Acara Belanja Modal			
	b) Tagihan/Berita Acara Belanja Modal Belanja Modal dengan Termin (Misal membangun gedung, Jalan dll)		Konstruksi dalam Pengerjaan Utang Pengadaan Aset Tetap ...	
	Saat SP2D LS (Belanja Modal)	R/K SKPD Kas di Kas Daerah	Utang Pengadaan Aset Tetap ... R/K PPKD	Belanja ... Perubahan SAL (7.3.4.01.01)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL PENGAKUAN BELANJA MODAL				
No	Dokumen Sumber SIMDA	Jurnal Akrual		Jurnal LRA
		BUD/PPKD	SKPD	
2	Tagihan/Berita Acara Belanja Modal			
	Belanja Modal Termin Terakhir (100%) (Misal membangun gedung, Jalan dll)		Konstruksi dalam Pengerjaan Utang Pengadaan Aset Tetap ...	
			Aset Tetap ... Konstruksi dalam Pengerjaan	
	Saat SP2D LS (Belanja Modal)	R/K SKPD Kas di Kas Daerah	Utang Pengadaan Aset Tetap ... R/K PPKD	Belanja ... Perubahan SAL (7.3.4.01.01)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PILIHAN JENIS TAGIHAN DAN PENGISIAN KONTRAK		
PILIHAN TAGIHAN	PENGISIAN KONTRAK	KETERANGAN
a. Belanja Operasional		
- Belanja Pegawai	Tidak Perlu	-
- Belanja Barang dan Jasa	Optional	-
b. Belanja Modal Non Termin	Wajib	Penatausahaan BMD
c. Belanja Modal Termin	Wajib	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kontrak tidak diisi tidak bisa disimpan • Berguna untuk memunculkan secara otomatis Jurnal Aset Tetap
d. Belanja Modal Termin Terakhir	Wajib	



5. Perhitungan Akumulasi Aset Tetap

1. Nilai Aset Tetap yang digunakan sebagai dasar perhitungan akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah nilai perolehan aset tetap dengan memperhitungkan kapitalisasi sampai dengan 31 Desember 2014
2. Tahun Mulai disusutkan berdasarkan Tanggal Perolehan yang tercatat dalam SIMDA BMD.
3. Masa Manfaat yang digunakan adalah sesuai dengan masa manfaat yang ditetapkan dalam perkara kebijakan akuntansi (default Permendagri 64)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

6. Jurnal atas transaksi keuangan Lainnya

Jurnal atas transaksi pengeluaran lainnya yang belum diotomatiskan berdasarkan penatausahaan pelaksanaan anggaran, dilakukan melalui jurnal entry sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan misalnya:

- Pencatatan realisasi pendapatan dan belanja BLUD
- Pencatatan realisasi pendapatan belanja dana JKN
- Transaksi, Koreksi dan Penyesuaian

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL

Jurnal berdasarkan prosesnya dikelompokkan dalam 2 jenis jurnal utama yaitu:

- Jurnal yang melalui proses dokumen transaksi umum/normal penatausahaan keuangan daerah dapat diotomatiskan dari aplikasi
- Jurnal yang tidak melalui proses dokumen transaksi umum/ normal penatausahaan keuangan daerah namun menggunakan Memo Jurnal karena memerlukan perlakuan khusus sehingga tidak dapat diotomatiskan dari aplikasi yaitu Jurnal Balik (awal tahun), jurnal penyesuaian, dan jurnal koreksi

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL TRANSAKSI YANG DAPAT DIOTOMATISKAN

Jurnal Transaksi yang dapat dihasilkan secara otomatis dari aplikasi adalah:

- Jurnal Transaksi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
- Jurnal Transaksi Belanja dan Beban
- Jurnal Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan
- Jurnal Korolari Pos-Pos Neraca (Kas, Piutang, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Dana Cadangan, Hutang dan Ekuitas) dari Transaksi Pendapatan LRA, Belanja dan Pembiayaan
- Jurnal Penutup untuk menutup transaksi LRA ke dalam LP-SAL dan Transaksi LO kedalam LPE

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL TRANSAKSI YANG TIDAK DAPAT DIOTOMATISKAN (1)

- **Jurnal Balik (Awal Tahun)**

Yaitu Jurnal yang dilakukan pada awal Tahun Anggaran, tidak melalui proses transaksi penatausahaan keuangan, biasanya menggunakan Memo Jurnal dan digunakan untuk penyesuaian saldo awal tahun yang antara lain disebabkan adanya penggunaan suatu metode tertentu, yang terdiri dari jurnal:

- Persediaan Awal (Periodik)
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL TRANSAKSI YANG TIDAK DAPAT DIOTOMATISKAN (2)

- **Jurnal Penyesuaian (1)**

Yaitu Jurnal yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran, tidak melalui proses transaksi normal transaksi penatausahaan keuangan, biasanya menggunakan Memo Jurnal dan digunakan untuk penyesuaian saldo yang antara lain disebabkan karena adanya penggunaan suatu metode tertentu, yang terdiri dari jurnal penyesuaian:

- Pendapatan LO dan Beban (LO)
- Surplus Defisit Non Operasional (LO)
- Pos-pos Luar Biasa (LO)
- Persediaan (LO dan Neraca)
- Bagian Lancar Piutang (Neraca)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL TRANSAKSI YANG TIDAK DAPAT DIOTOMATISKAN (2)

- **Jurnal Penyesuaian (2)**

- Beban Penyisihan Piutang (LO) dan Penyisihan Piutang (Neraca)
- Piutang (terkait dengan Bagian Lancar)
- Beban Dibayar Dimuka
- Investasi (terkait dengan metode Ekuitas dan NRV)
- Beban Penyusutan (LO) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Neraca)
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
- Hutang Bunga
- Hutang (terkait dengan Bagian Lancar)

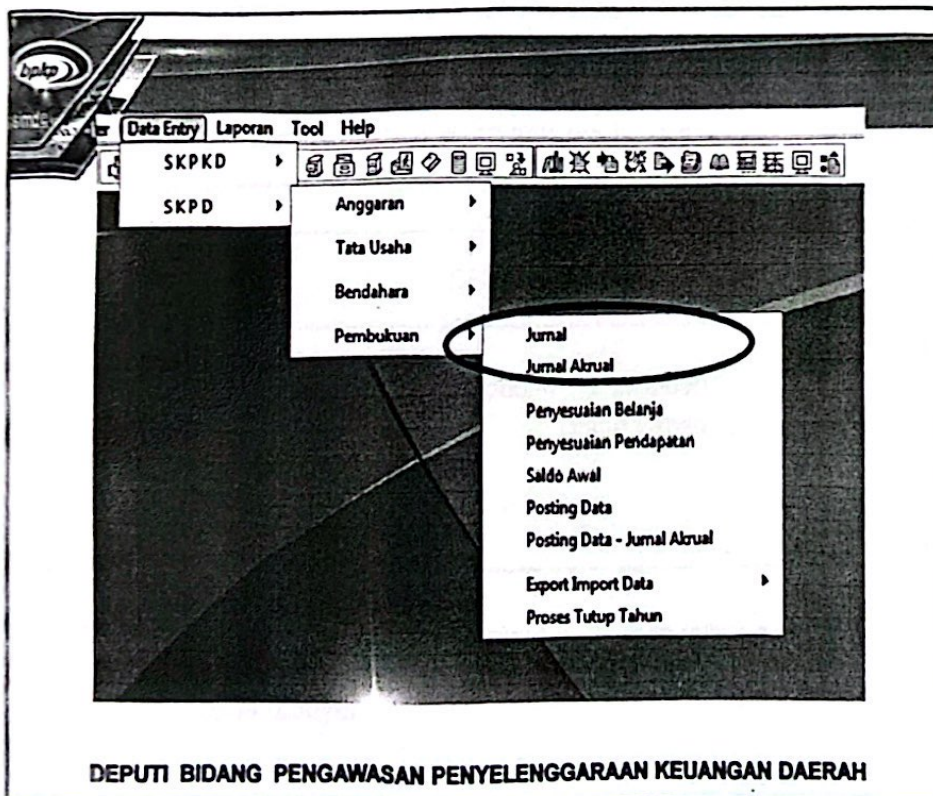
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL TRANSAKSI YANG TIDAK DAPAT DIOTOMATISKAN (3)

• Jurnal Koreksi

Merupakan jurnal yang dihasilkan tanpa melalui proses transaksi umum/ normal transaksi penatausahaan keuangan, biasanya menggunakan memo jurnal dan digunakan untuk melakukan koreksi atas suatu transaksi yang antara lain sebabkan karena ditemukannya adanya kesalahan pencatatan baik di periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH



DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

**CONTOH JURNAL PENYESUAIAN/KOREKSI
AKHIR TAHUN**

PENDAPATAN

2	Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima, namun seharusnya merupakan pendapatan tahun berikutnya	Pendapatan - LODebet) Pendapatan diterima dimuka ... (Kredit)
---	---	--

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

**CONTOH JURNAL PENYESUAIAN/KOREKSI
SAAT PENYUSUNAN LAP. KEU. / AKHIR TAHUN**

BEBAN

1	Dokumen tagihan sudah jadi beban/menjadi kewajiban tapi belum dibayar sampai dengan akhir tahun	BebanDebet) Utang Beban (Kredit)
---	---	---

Contoh : - Tagihan listrik/telpon/air atau tagihan lainnya yang terjadi bulan nopember/desembe tapi sampai 31 Des belum dibayar

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

**CONTOH JURNAL PENYESUAIAN/KOREKSI
SAAT PENYUSUNAN LAP. KEU. / AKHIR TAHUN**

BEBAN

2	Pengeluaran kas namun belum menjadi beban /kewajiban	Beban dibayar dimukaDebet) Beban (Kredit)
---	--	--

Contoh : - Membayar sewa untuk 2 tahun, atau satu tahun tapi melewati tahun anggaran
- Membayar Premi asuransi untuk jangka waktu lebih dari satu tahun

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PENAMBAHAN ASET TETAP

PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP

1	Aset Tetap (Debet)
	Pendapatan Hibah dari-LO (Kredit)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH₄₂

JURNAL STANDAR PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

1	Pengakuan persediaan berdasarkan hasil stock opname (dengan metode periodik)	Persediaan (Debet) Beban Persediaan (Kredit)
2	Penyusutan Aset Tetap	Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit)
3	Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang (Debet) Penyisihan Piutang (Kredit)

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH₄₃

TRANSAKSI BLUD/JKN

MENU JURNAL (BASIS KAS)

Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN/BLUD.....100.000.000

Pendapatan Dana Kapitasi JKN /Pendapatan BLUD.....100.000.000

MENU JURNAL AKRUAL

LO

Kas Lainnya/Kas di BLUD..... 100.000.000

Pendapatan Dana Kapitasi JKN /BLUD -LO 100.000.000

LRA

Perubahan SAL..... 100.000.000

Pendapatan Dana Kapitasi JKN/BLUD -LRA..... 100.000.000

MENU JURNAL (BASIS KAS)		TRANSAKSI BLUD/JKN	
	Belanja Pegawai BLUD.....	40.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	10.000.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran.....	50.000.000	
Kas Di Bendahara Dana Kapitasi JKN/Kas di BLUD.....		100.000.000	
MENU JURNAL AKRUAL			
	Beban Pegawai BLUD	40.000.000	
	Beban Barang dan Jasa BLUD	10.000.000	
	Alat Kedokteran.....	50.000.000	
LO	Kas Lainnya/Kas di BLUD..... ..100.000.000		
	Belanja Pegawai BLUD.....	40.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	10.000.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran.....	50.000.000	
LRA	Perubahan SAL		100.000.000

Laporan Operasional		
I.	Pendapatan - LO	145
II.	Beban	75
III.	Surplus/Defisit Operasional (I - II)	70
IV.	Kegiatan Non Operasional	20
V.	Pos Luar Biasa	(5)
VI.	Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)	85
Laporan Perubahan Ekuitas		
I.	Ekuitas Awal	350
II.	Surplus/Defisit - LO	85
III.	Ekuitas Akhir (I - II)	435
Neraca		
I.	Aset	515
II.	Kewajiban dan Ekuitas	515
	1. Kewajiban	80
	2. Ekuitas	435

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Unit Organisasi : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Sub Unit Organisasi : 1.10.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2015
9.3.5	Beban Hibah	0,00
9.3.6	Beban Bantuan Sosial	0,00
9.3.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00
9.3.8	Beban Penyalihan Piutang	0,00
9.3.9	Beban Lain-lain	0,00
9.2	BEBAN TRANSFER	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00
9.3.1	Defisit Pengalihan Aset Non Lancar - LO	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00
SURPLUS/DEFISIT		(3.453.491.473,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	2.113.085.436,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.453.491.473,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBILANGAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Penjualan	0,00	0,00
Selisih Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.113.085.436,00	0,00

Laporan Pembukuan Aktual SKPD

NERACA

Pilih Laporan

- Rekening
- Jurnal
- Buku Besar
- Buku Besar Pembantu
- Buku Besar Pembantu per No. Bukti
- Neraca
- Laporan Awal Tahun
- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan DL
- Memo Pembukuan
- Memo Jurnal
- Daftar Saldo Buku Besar
- Rincian Saldo Buku Besar
- Saldo Buku Besar Konversi SAP
- Daftar Jurnal Yang Belum Di Posting

Tanggal: [] - [31/12/2015]

Uraian: [1 Uraian Wajib]

Bidang: [10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil]

Unit / Perangkat Daerah: [1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil]

Sub Unit: [1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil]

Program: []

Kegiatan: []

Jenis Laporan: [NERACA SEBELUM PENYUSUNAN BILAN]

Akun: []

Kelompok: []

Jenis: []

Obyek: []

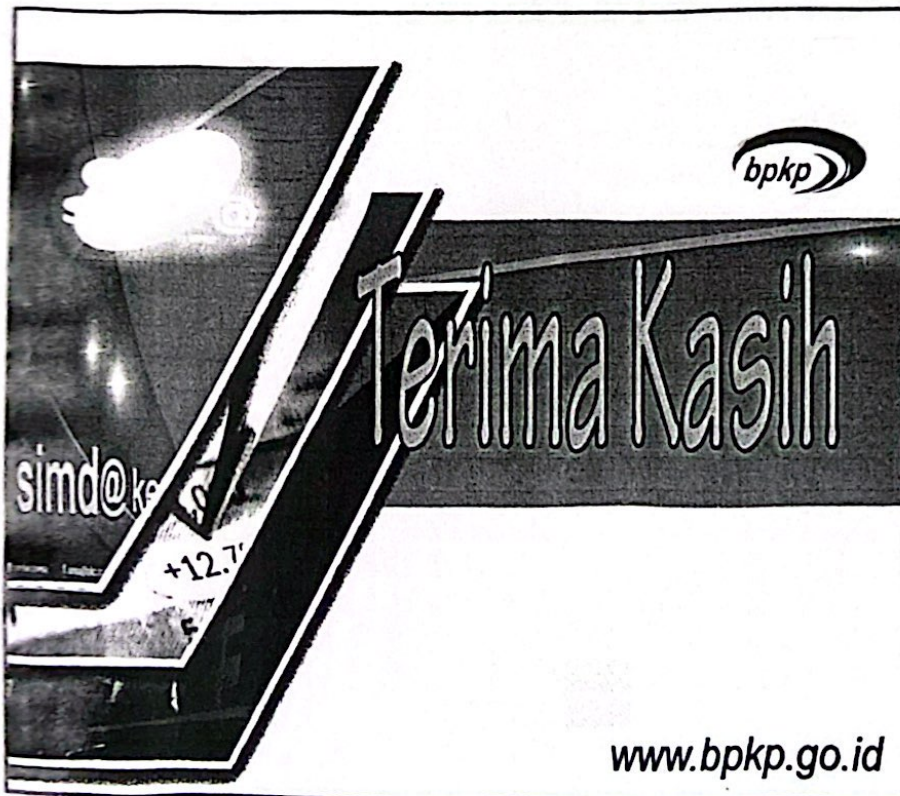
Rincian Obyek: []

URAIAN	2015	2014
JMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.961.127.465,00	9.496.707,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	3.961.127.465,00	9.496.707,00
EKUITAS	2.113.095.426,00	5.566.577.299,00
EKUITAS	2.113.095.426,00	5.566.577.299,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	6.074.222.891,00	5.576.094.096,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015	2014
EKUITAS AWAL	5.566.577.299,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(1.453.481.873,00)	0,00
DAMPAK KUMILATIF PERUBAHAN KEBUKUKAN/KESALAHAN HENDAKAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Salah Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi lainnya	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	2.113.095.426,00	0,00



MODUL PELATIHAN SIMDA 2.7 BERBASIS AKRUAL

BABIII. MODUL PELATIHAN PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

A. TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SIMDA

(SKPD yang digunakan untuk latihan adalah DPPKAD sebagai SKPD)

1. Memasukkan Saldo Neraca Awal

Saldo neraca awal yang akan diinputkan dalam aplikasi Simda harus dibagi ke masing-masing SKPD dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan *log in* tahun sebelumnya, misalnya untuk memasukkan saldo awal tahun 2016, maka harus *log in* ke tahun 2015.
- 2) Mengisi data umum pemerintah daerah, dengan menggunakan menu: *Parameter => Data Umum Pemda*
- 3) Mengisi data umum SKPD, dengan menggunakan menu: *Data Entry => SKPD => Anggaran => Renstra SKPD*. Pengisian data umum SKPD dilakukan untuk semua SKPD yang akan diisikan saldo awalnya.

2. Jurnal Balik

1) Basis Kas:

Adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian tahun lalu atas persediaan, piutang dan hutang

2) Basis Akrual:

Adalah jurnal yang dilakukan untuk pencatatan dan pengakuan persediaan awal sebagai beban persediaan jika menggunakan metode periodik.

3. Posting Transaksi Tahun Berjalan

Posting transaksi tahun berjalan diperlukan untuk, memasukkan data transaksi ke dalam dokumen-dokumen pembukuan/akuntansi. Sebelum melakukan posting data transaksi, dapatkan dokumen sumber yang menjadi dasar melakukan posting. Dasar

melakukan posting untuk belanja adalah ketika pengeluaran belanja sudah diterbitkan SP2D dan untuk pendapatan dapat dilakukan posting setelah penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.

Posting Jurnal dilakukan 2 (dua) kali yaitu di SKPD dan SKPKD.

- 1) Posting di SKPD dilakukan dengan menu : **Data Entry =>SKPD =>Pembukuan =>Posting Data**
- 2) Posting di SKPKD dilakukan dengan menu : **Data Entry =>SKPKD =>Pembukuan => Posting Data**

4. Pencatatan Koreksi

1) Penyesuaian Belanja dan Penyesuaian Pendapatan

- a. Penyesuaian belanja diinput dalam menu **Data Entry =>SKPD =>Pembukuan =>Penyesuaian belanja**. Digunakan untuk membukukan penyesuaian belanja atas belanja yang telah dibebankan dalam tahun berjalan yang terdiri atas Koreksi Belanja, Pengurangan Belanja dan Penambahan Belanja
- b. Penyesuaian pendapatandiinput dalam menu **Data Entry =>SKPD =>Pembukuan =>PenyesuaianPendapatan**. Digunakan untuk membukukan penyesuaian pendapatanatas pendapatan yang telah diterima dalam tahun berjalan yang terdiri atas Koreksi pendapatan dan Pengurang pendapatan

2) Pembuatan Jurnal Koreksi dan Jurnal Penyesuaian

Pembuatan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian dilakukan dengan menggunakan menu : **Data Entry =>SKPD atau SKPKD =>Pembukuan =>Jurnal**

5. Rekonsiliasi Saldo Buku Kas Daerah

Kegiatan rekonsiliasi antara saldo kas daerah/buku pembantu kas daerah menurut pembukuan aplikasi simda dengan rekening koran kas daerah dari bank pemegang kas daerah.

6. Reklasifikasi Akhir Tahun

Jurnal yang dibuat pada akhir tahun atas pengadaan/pembangunan aset tetap yang sampai dengan akhir tahun, pengerjaannya belum selesai dan jurnal kapitalisasi atas biaya umum terkait pengadaan aset tetap.

7. Proses Tutup Tahun

Merupakan fasilitas baru dalam simda keuangan rev.14 berupa proses pembuatan jurnal penutup yang secara otomatis dibuatkan oleh sistem. Proses tutup tahun menggunakan menu : Data entry=> SKPD => Pembukuan =>Proses Tutup Tahun. Proses tutup tahun menghasilkan jurnal penutup yang merupakan jurnal pada akhir tahun untuk menihilkan saldo buku besar akun-akun nominal (akun LRA dan akun LO, termasuk akun Perubahan SAL) agar di awal tahun berikutnya mempunyai saldo awal nol.

B. SOAL LATIHAN PEMBUKUAN

1. Data Penyusunan Neraca Awal

Data yang tersedia pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simulasi untuk penyusunan Neraca awal per 31 Desember 2015.

a. Neraca Saldo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) *

No Rek	Uraian	Debet	Kredit
1.1.1.2.1	Kas di Bendahara Penerimaan	1.000.000	
1.1.1.3.2	Kas di bendahara pengeluaran-tunai	2.500.000	
3.1.1.1.1	SILPA		3.000.000
2.1.1.3.1	Hutang PFK PPh Pasal 21		500.000
1.1.5.1.1	Persediaan ATK	1.000.000	
3.1.3.1.1	Cadangan Persediaan		1.000.000
1.1.3.1.9	Piutang Pajak Reklame	10.000.000	
3.1.2.1.1	Cadangan Piutang		10.000.000
1.3.1.11.4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	200.000.000	
1.3.2.4.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000	
1.3.2.14.3	Alat Reproduksi (Pengganda)	10.000.000	
1.3.2.15.1	Meubelair	27.000.000	
1.3.2.17.7	Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000	
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	
1.3.5.1.4	Buku ilmu Sosial	3.000.000	
1.3.6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	300.000.000	
1.3.7.1.26	Akumulasi Penyusutan Kendaraan inas Bermotor Perorangan	(20.000.000)	
1.3.7.1.91	Akumulasi Penyusutan Alat	(2.000.000)	

	Pengganda (Reproduksi)		
1.3.7.1.94	Akumulasi Penyusutan Meubelair	(4.000.000)	
1.3.7.1.113	Akumulasi Penyusutan Lemari Arsip Pejabat	(1.000.000)	
1.3.7.2.1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	(20.000.000)	
3.2.2.1.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		748.000.000
	Jumlah	762.000.000	762.000.000

b. Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD selaku SKPD per 31-12-2015

No Rek	Uraian	Debet	Kredit
4.1.1.1.6	Hotel Bintang Satu		2.180.340.000
4.1.1.1.7	Hotel Melati Tiga		1.650.900.000
4.1.1.2.1	Restoran		720.445.000
4.1.1.5.1	Pajak Penerangan Jalan PLN		540.670.000
4.1.1.6.5	Batu Apung		422.450.000
4.1.3.1.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD		100.000.000
4.1.4.1.2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		230.446.000
5.1.1.1.1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	850.446.233	
5.1.1.1.2	Tunjangan Keluarga	85.044.623	
5.1.1.1.3	Tunjangan Jabatan	180.332.000	
5.1.1.1.4	Tunjangan Fungsional	20.350.000	
5.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000	
5.2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.000.000	
5.2.2.1.1	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000	
5.2.2.3.1	Belanja Telepon	12.000.000	

5.2.2.3.2	Belanja Air	6.000.000	
5.2.2.3.3	Belanja Listrik	15.000.000	
5.2.2.15.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	
5.2.2.15.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000	
5.2.3.17.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000	
5.2.3.28.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000	
5.2.3.49.1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300.000.000	
5.2.3.82.4	Belanja modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	3.000.000	

c. Data potongan dan penyeteroran PFK SKPD tahun 2015

No Rek	Uraian	Debet	Kredit
7.1.1.4.1	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21		58.950.000
7.1.1.4.3	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23		50.850.000
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21	58.450.000	
7.2.1.4.3	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23	50.850.000	

1. Jurnal Balik

Jurnal untuk membalik saldo akhir tahun 2015 atas rekening :

a. Persediaan ATK

Di SKPD :

Jurnal balik atas saldo awal persediaan ATK

No. Jurnal : 01/JB/01/2016 tgl 1 Januari 2016

3.1.3.1.1	Cadangan Persediaan	1.000.000	
1.1.5.1.1	Persediaan ATK		1.000.000
	(Jurnal Balik atas saldo awal persediaan ATK)		

Di SKPD (Akrual):			
Jurnal pengakuan beban atas saldo awal persediaan ATK			
No. Jurnal : 01/JBA/01/2016 tgl 1 Januari 2016			
9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.000.000	
1.1.7.1.1	Persediaan ATK		1.000.000
	(Jurnal Balik atas saldo awal persediaan ATK)		

b. Piutang Pajak

Di SKPD:			
Jurnal balik atas saldo awal piutang pajak			
No. Jurnal : 02/JB/01/2016 tgl 1 Januari 2016			
1.	3.1.2.1.1	Cadangan Piutang	10.000.000
	1.1.3.1.9	Piutang Pajak Reklame	10.000.000
	(Jurnal Balik atas saldo awal piutang pajak)		

2. Data Untuk Pembukuan

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2016 bendahara pengeluaran menyetorkan sisa uang persediaan sebesar Rp2.000.000,- dengan bukti nomor 001/STS/1.20.5.1/2016. Penyetoran tersebut dibukukan melalui menu setoran sisa UP.
- 2) Pada tanggal 5 Januari 2016 Bendahara Penerimaan menyetorkan saldo awal kas di bendahara penerimaan ke kas daerah sebesar Rp. 1.000.000.

Rek.	Uraian	Debet	Kredit
Jurnal di SKPD No. 03/JK/01/2016 tgl 5 Januari 2016			

2.1.8.1.1	R/K Pusat	1.000.000	
1.1.1.2.1	Kas di Bendahara Penerimaan		1.000.000
Jurnal di SKPKD No. 04/JK/01/2016 tgl 5 Januari 2016			
1.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	1.000.000	
1.1.8.1.1	R/K SKPD		1.000.000

Di SKPD (Akrual) :			
No. Jurnal : 03/JKA/01/2016 tgl 5 Januari 2016			
1.	2.1.7.1.1	R/K PPKD	1.000.000
	1.1.1.2.1	Kas Di Bendahara Penerimaan	1.000.000
(Jurnal setoran saldo awal kas di bendahara penerimaan sesuai bukti STS nomor 003/STS/2016)			

Di SKPKD (Akrual) :			
No. Jurnal : 04/JKA/01/2016 tgl 5 Januari 2016			
1.	1.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah.....	1.000.000
	1.1.8.1.1	R/K SKPD	1.000.000
(Jurnal setoran saldo awal kas di bendahara penerimaan sesuai bukti STS nomor 003/STS/2016)			

- 3) Tanggal 7 Januari 2016 bendahara pengeluaran menyetorkan saldo akhir pungutan PPh Pasal 21 tahun 2012 ke Kas Negara sebesar Rp. 500.000 dengan bukti nomor 004/SSP/2016.

Di SKPD (Basis Kas) :			
No. Jurnal : 05/JK/01/2016 tgl 7 Januari 2016			
Rek.	Uraian	Debet	Kredit
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK-PPh Ps.21	500.000	
1.1.1.3.2	Kas di bendahara Pengeluaran - Tunai		500.000
(Jurnal setoran hutang PFK tahun 2015 dengan no bukti 004/SSP/2016)			

Di SKPD (Basis Kas) :			
No. Jurnal : 05/JK/01/2016 tgl 7 Januari 2016			
Rek.	Uraian	Debet	Kredit
2.1.1.3.1	Utang PPh 21	500.000	
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK-PPh Ps.21		500.000
(Jurnal setoran hutang PFK tahun 2015 dengan no bukti 004/SSP/2016)			
Di SKPD (Akrual) :			
No. Jurnal : 05/JKA/01/2016 tgl 7 Januari 2016			
1.	2.1.1.3.1	Utang PPh 21	500.000
	1.1.1.3.2	Kas Di Bendahara Pengeluaran-Tunai	500.000
(Jurnal setoran hutang PFK tahun 2015 dengan no bukti 004/SSP/2016)			

- 4) Bendahara Umum Daerah pada tanggal 7 Januari 2016 menyetorkan saldo akhir tahun 2015 atas pungutan PPh pasal 21 ke kas negara sebesar Rp. 100.000.000 dan pungutan taperum sebesar Rp. 20.000.000 ke Bapertarum dengan SSP no. 010/SSP/2016

Di SKPKD :			
No. Jurnal : 06/JK/01/2016 tgl 7 Januari 2016			
Rek.	Uraian	Debet	Kredit
7.2.1.4.1	Pengeluaran PFK-PPh Ps.21	100.000.000	
7.2.1.6.1	Pengeluaran PFK-Taperum	20.000.000	
1.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah		120.000.000
(Penyetorkan saldo akhir kas di Kasda ke kas negara dan Bapertarum sesuai bukti SSP no. 010/SSP/2016.)			

Di SKPKD (Akrual) :			
No. Jurnal : 06/JKA/01/2016 tgl 7 Januari 2016			
1.	2.1.1.3.1	Utang PPh 21	100.000.000
	2.1.1.5.1	Utang Taperum	20.000.000

1.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah		120.000.000
	(Penyetorkan saldo akhir kas di Kasda ke kas negara dan Bapertarum sesuai bukti SSP no. 010/SSP/2016.)		

- 5) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pajak Reklame Papan Billboard yang suratketetapan pajak daerah terbit tahun 2015 dan sebelumnya dengan rincian:

No & Tgl TBP	Nama & Alamat Penyetor	Kode Rek	Uraian	Nilai
- Penerimaan PAD Pajak Reklame Papan				
020/TBP/1.20.5.1/2016 26/01/2016	- Mardiono (Hotel Mutlara) - Jl. Kartika I Kab Simulasi	4.1.1.4.1	Reklame Papan	7.000.000

No & Tgl STS	Kode Rek	Uraian	Nilai
012/STS/1.20.5.1/2016 26/01/2016	4.1.1.4.1	Reklame Papan	7.000.000

Atas transaksi BP dan STS tersebut perlu dilakukan perlu dilakukan jurnal penyesuaian:

Di SKPD (Akrual)			
No. Jurnal : 31/JKA/01/2016 Tgl, 25 Januari 2016			
8.1.1.4.1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron-LO	7.000.000	
1.1.3.1.9	Piutang Pajak Reklame		7.000.000
(Jurnal Koreksi untuk penerimaan Pajak reklame yg merupakan piutang pajak tahun 2015 yang diterima di tahun 2016 dengan no bukti 020/TBP/1.20.5.1/2016 tanggal 25-01-2016)			

- 6) Koreksi Pengembalian Belanja pada tahun berjalan

Terhadap SP2D No: 123 Tanggal 02/01/2016 atas belanja gaji terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan. Hal ini terjadi karena satu orang PNS sudah

pensiun ternyata masih dibayar gajinya. Pengembalian disetor dengan STS 0012/STS/1.20.5.1/2016 tanggal 05-02-2016.

Rincian belanja yang dikembalikan sbb :

Gaji Pokok	Rp 2.560.000,00
Tunjangan Keluarga	Rp 520.000,00
Tunjangan Fungsional	Rp 450.000,00
Tunjangan Beras	<u>Rp. 180.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 3.710.000,00</u>

Transaksi tersebut diatas dibukukan melalui menu pengurang belanja.

7) Pembukuan melalui media Jurnal Koreksi

Petunjuk Pengoperasian	
1.	<i>Menu Data Entry => SKPD/SKPKD =>Pembukuan => Jurnal => Pilih Unit organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(SKPD) atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKD) .</i>
2.	<i>Pilih tombol Jurnal, kemudianisi denganKlik pada tombol Tambah dan diakhiri dengan tombol Simpan</i>

- a. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Simulasi tentang kapitalisasi aset menyatakan bahwa "Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut siap untuk dioperasikan". Berdasarkan kebijakan tersebut, maka atas PembangunanGedung Kantor terdapat biaya yang harus dikapitalisasi dengan rincian sbb :

▪ Honorarium panitia pelaksana kegiatan	Rp 2.800.000,00
▪ Honorarium panitia Pengadaan	Rp 3.400.000,00
▪ Belanja Alat Tulis kantor	<u>Rp 2.800.000,00</u>
Jumlah untuk dikapitalisasi	Rp 9.000.000,00

Di SKPD			
No. Jurnal : 07/JK/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.3.3.1.1	Gedung kantor	9.000.000	
3.2.2.1.1	Diinvestasikan dalam Aset tetap		9.000.000
(pembukuan kapitalisasi biaya umum pembangunan gedung kantor)			

Di SKPD (Akrual)			
No. Jurnal : 07/JKA/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.3.3.1.1	Gedung kantor	9.000.000	
9.1.2.25.1	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO		2.800.000
9.1.2.25.2	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO		3.400.000
9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor		2.800.000
(pembukuan kapitalisasi biaya umum pembangunan gedung kantor)			

b. Koreksi salah pembebanan rekening belanja

Adanya penyusunan anggaran belanja yang tidak tepat dan anggaran perubahan belum ditetapkan, belanja pegawai untuk rekening *Tunjangan Keluarga* DPPKAD selaku SKPD untuk pembayaran gaji bulan Oktober 2016 telah habis dananya. Bagian Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD selaku PPKD) menyarankan agar mengambil dana anggaran dari rekening gaji pokok. Jumlah dana yang diambil adalah sebesar Rp. 5.000.000,00. Jurnal koreksi yang dibuat pada akhir tahun 2016 adalah sbb:

Di SKPD			
No. Jurnal : 08/JK/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.	5.1.1.1.2	Tunjangan Keluarga	5.000.000

5.1.1.1.1	Gaji Pokok/Uang Representasi		5.000.000
(koreksi kesalahan pembebanan belanja)			

Di SKPD (Akrual)			
No. Jurnal : 08/JKA/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.	9.1.1.1.2	Beban Tunjangan Keluarga	5.000.000
	9.1.1.1.1	Beban Gaji Pokok/Uang Representasi	5.000.000
(koreksi kesalahan pembebanan belanja)			

c. Koreksi Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan

Dari hasil verifikasi terhadap STS No. 006/STS/1.20.5.1/2016 tanggal 02/02/2016 terdapat kelebihan penyetoran atas Pajak Hotel sebesar Rp 2.000.000,00 dan dikembalikan ke pihak ke tiga pada tanggal 12 Oktober 2016.

Di SKPD :			
No. Jurnal : 09/JK/01/2016 Tgl, 12 Oktober 2016			
1.	4.1.1.6.1	Hotel Bintang Satu	2.000.000
	2.1.8.1.1	R/K Pusat	2.000.000
(Koreksi atas pengembalian pendapatan pajak hotel)			

Di SKPKD :			
No. Jurnal : 10/JK/01/2016 Tgl, 12 Oktober 2016			
1.	1.1.8.1.1	R/K SKPD	2.000.000
	1.1.1.1.1	Kas di Kasda	2.000.000
(Koreksi atas pengembalian pendapatan pajak hotel)			

Di SKPD (Akrual):

No. Jurnal : 09/JKA/01/2016 Tgl, 12 Oktober 2016				
1.	8.1.1.6.1	Hotel - LO	2.000.000	
	2.1.7.1.1	R/K PPKD		2.000.000
(Koreksi atas pengembalian pendapatan pajak hotel)				

Di SKPD (AkruaI):				
No. Jurnal : 10/JKA/01/2016 Tgl, 12 Oktober 2016				
1.	4.1.1.6.1	Hotel - LRA	2.000.000	
	7.3.4.1.1	Perubahan SAL		2.000.000
(Koreksi atas pengembalian pendapatan pajak hotel)				

Di SKPKD (AkruaI):				
No. Jurnal : 11/JKA/01/2016 Tgl, 12 Oktober 2016				
1.	1.1.8.1.1	R/K SKPD	2.000.000	
	1.1.1.1.1	Kas Di Kasda		2.000.000
(Koreksi atas pengembalian pendapatan pajak hotel)				

d. Koreksi Pengembalian atas Belanja tahun 2015 yang disetorkan pada Tahun Anggaran 2016

Dari hasil audit INSPEKTORAT tahun anggaran 2015 yang dilakukan pada tahun anggaran 2016, terdapat Belanja Barang barang dan jasa yang terlalu besar dibayarkan kepada Penyedia Barang dan jasa yaitu PT. Maju Belum Berkembang sebesar Rp 5.000.000,00. Atas rekomendasi Bawasda Pimpinan Kegiatan telah menerima bukti setor dari pihak rekanan Jasa (rekanan setor langsung ke rekening kas daerah). Atas bukti setor tersebut, maka perlu dilakukan jurnal koreksi.

(koreksi ini bisa juga dilakukan dengan menu penyesuaian belanja-koreksi)

Di SKPD :				
No. Jurnal : 12/JK/01/2016 Tgl, 21 Oktober 2016				
1.	2.1.8.1.1	R/K Pusat	5.000.000	
	4.1.4.18.1	Penerimaan Lain-Lain		5.000.000
(jurnal koreksi pengembalian belanja tahun 2015)				

Di SKPKD :No. Jurnal : 13/JK/01/2016 Tgl, 21 Oktober 2016				
1.	1.1.1.1.1	Kas di Kasda	5.000.000	
	1.1.8.1.1	R/K SKPD		5.000.000
(jurnal penerimaan atas pengembalian belanja tahun 2015)				

Di SKPD (AkruaI): - LRA				
No. Jurnal : 12/JKA/01/2016 Tgl, 21 Oktober 2016				
1.	7.3.4.1.1	Perubahan SAL	5.000.000	
	4.1.4.19.1	Lain-lain PAD yg Sah Lainnya-LRA		5.000.000
(jurnal koreksi pengembalian belanja tahun 2015)				

Di SKPD (AkruaI): - LO				
No. Jurnal : 13/JKA/01/2016 Tgl, 21 Oktober 2016				
2.1.7.1.1		R/K PPKD	5.000.000	
8.1.4.19.1		Lain-lain PAD yg Sah Lainnya -LO		5.000.000
(jurnal koreksi pengembalian belanja tahun 2015)				

Di SKPKD (Akrual):			
No. Jurnal : 14/JKA/01/2016 Tgl, 21 Oktober 2016			
1.1.1.1.1	Kas di Kasda	5.000.000	
1.1.8.1.1	R/K SKPD		5.000.000
(jurnal koreksi pengembalian belanja tahun 2015)			

- e. Terdapat SP2D GU Nomor:0003/SP2D-GU/1.20.5.1/2016 tanggal 01/04/2016 pada jenis rekening belanja barang dan jasa yang realisasinya ada pembelian satu buah printer seharga Rp.1.600.000,00.

Di SKPD :			
No. Jurnal : 15/JK/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.	1.3.2.16.4	Peralatan Mini Komputer	1.600.000
	3.2.2.1.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.600.000
(pembukuan aset tetap printer yang dibeli dengan dana UP)			

Di SKPD (Akrual):			
No. Jurnal : 15/JKA/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.	1.3.2.16.4	Peralatan Mini Komputer	1.600.000
	9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	1.600.000
(pembukuan aset tetap printer yang dibeli dengan dana UP)			

- f. Koreksi pembukuan atas Potongan PFK lainnya berupa potongan IMB berdasarkan SP2D no. 01120/SP2D/1.20.5.1/2016 menjadi pendapatan retribusi IMB.

Di SKPD:			
No. Jurnal : 16/JK/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
2.1.8.1.1	R/K Pusat	4.300.000	
4.1.2.3.1	Retribusi IMB		4.300.000
(Jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan IMB yang dimasukkan dalam potongan IMB pada SP2D)			

Di SKPKD:			
No. Jurnal : 17/JK/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
7.2.1.7.1	Pengeluaran PFK-lainnya	4.300.000	
1.1.8.1.1	R/K SKPD		4.300.000
(Jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan IMB yang dimasukkan dalam potongan IMB pada SP2D)			

Di SKPD (Akrual):			
No. Jurnal : 16/JKA/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
2.1.1.7.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	4.300.000	
8.1.2.26.1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO		4.300.000
(Jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan IMB yang dimasukkan dalam potongan IMB pada SP2D)			

Di SKPD (Akrual):			
No. Jurnal : 17/JKA/01/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
7.3.4.1.1	Perubahan SAL	4.300.000	
4.1.2.26.1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA		4.300.000
(Jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan IMB yang dimasukkan dalam potongan IMB pada SP2D)			

g. Data Untuk Pembuatan Jurnal Penyesuaian

- a) Pada 31 Desember 2016 terdapat persediaan ATK sebesar Rp 500.000,00

Di SKPD			
Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir persediaan ATK			
No. Jurnal : 18/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.1.5.1.1	Persediaan Alat Tulis Kantor	500.000	
3.1.3.1.1	Cadangan Persediaan		500.000
(Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir ATK)			

Di SKPD (Akrual)			
Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir persediaan ATK			
No. Jurnal : 18/JPA/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.1.7.1.1	Persediaan Alat Tulis Kantor	500.000	
9.1.2.1.1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor		500.000
(Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir ATK)			

- b) Pada 31 Desember 2016 terdapat Piutang Pajak Reklame yang masih harus diterima sebesar Rp 3.000.000,00.

Di SKPD			
No. Jurnal : 19/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.1.3.1.9	Piutang Pajak Reklame	3.000.000	
3.1.2.1.1	Cadangan Piutang		3.000.000
(Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir piutang pajak reklame)			

Di SKPD (Akrual)			
No. Jurnal : 19/JPA/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.1.3.1.9	Piutang Pajak Reklame	3.000.000	
8.1.1.9.1	Pajak Reklame Papan Billboard/Vidiotron/Megatron-LO		3.000.000
(Jurnal Penyesuaian atas saldo akhir piutang pajak reklame)			

- c) Cicilan pokok hutang kepada Bank Pembangunan Daerah Simulasi yang jatuh tempo pada tahun 2016 sebesar Rp 500.000.000

Di SKPD			
No. Jurnal : 20/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
2.1.4.1.1	Hutang Bank	500.000.000	
3.1.4.1.1	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		500.000.000
(jurnal penyesuaian untuk mengakui cicilan pokok utang bank yang jatuh tempo tahun 2016)			

Di SKPD			
No. Jurnal : 21/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
2.2.1.1.1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	500.000.000	
3.2.4.1.1	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jk panjang		500.000.000
(Jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun 2016)			

Di SKPD (Akrual)			
No. Jurnal : 20/JPA/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
2.2.1.1.1	Hutang Dalam Negeri Sektor Perbankan	500.000.000	
2.1.3.1.1	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		500.000.000
(Jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi atas utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun 2016)			

- d) Terhadap bangunan yang masih dalam konstruksi dalam penyelesaian per 31 Desember 2015, pada akhir tahun buku 2016 telah selesai pembangunannya.

Di SKPD :			
No. Jurnal : 22/JP/12/2016Tgl, 31 Desember 2016			
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Kantor	300.000.000	
1.3.6.1.1	Konstruksi dalam penyelesaian		300.000.000
(Jurnal Penyesuaian atas saldo awal KDP yang sudah selesai pembangunannya)			

Di SKPD (Akrual) :			
No. Jurnal : 22/JPA/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Kantor	300.000.000	
1.3.6.1.1	Konstruksi dalam penyelesaian		300.000.000

(Jurnal Penyesuaian atas saldo awal KDP yang sudah selesai pembangunannya)

e) Perhitungan nilai penyusutan Aset Tetap Tahun 2016 adalah :

Kode Rekening	Uraian	Nilai Perolehan per 31 Des 2016	Akumulasi Penyusutan	Penyusutan 2016	Nilai Buku 2016
1.3.2.4.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000	20.000.000	30.000.000	100.000.000
1.3.2.14.3	Alat Reproduksi (Pengganda)	10.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
1.3.2.15.1	Meubelair	27.000.000	4.000.000	5.400.000	17.600.000
1.3.2.16.4	Peralatan Mini Komputer	1.600.000	0	320.000	1.280.000
1.3.2.17.7	Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
1.3.3.1.1	Bangunan Gedung Kantor	1.689.000.000	20.000.000	80.000.000	1.589.000.000
		1.882.600.000	47.000.000	118.720.000	1.716.880.000

Jurnal Penyesuaian :

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 23/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.1.26	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000	
1.3.7.1.26	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		30.000.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 24/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.1.91	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.000.000	
1.3.7.1.91	Akumulasi Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)		2.000.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 25/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.1.94	Beban Penyusutan Mebelair	5.400.000	
1.3.7.1.94	Akumulasi Penyusutan Mebelair		5.400.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 26/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.1.104	Beban Penyusutan Peralatan Mini Komputer	320.000	
1.3.7.1.104	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mini Komputer		320.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 27/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.1.113	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	1.000.000	
1.3.7.1.113	Akumulasi Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat		1.000.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

Di SKPD Akrual:			
No. Jurnal : 28/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.7.2.1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000	
1.3.7.2.1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor		80.000.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyusutan aset tetap tahun 2016)			

f) Nilai penyisihan piutang untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp150.000

Di SKPD Akrual :			
No. Jurnal : 29/JP/12/2016 Tgl, 31 Desember 2016			
9.1.8.1.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	150.000	
1.1.5.1.1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		150.000
(Jurnal Penyesuaian untuk penyisihan piutang tahun 2016)			

3. Rekonsiliasi Saldo Kas Daerah

Saldo rekening kas daerah per 31 Desember 2016, dalam Aplikasi SIMDA dapat dilihat dari menu : *Laporan=>SKPKD => BUD => BUD* pilih Laporan Buku Pembantu Kas Daerah atau Laporan Rekapitulasi Saldo Kas Daerah. Bandingkan saldo rekening kas daerah menurut rekening koran bank dengan pembukuan SIMDA (Buku pembantu kas daerah).

4. Posting Jurnal

Posting jurnal baik transaksi SKPD maupun transaksi SKPKD melalui menu :

a. Posting Jurnal

Digunakan untuk posting transaksi basis kas

Menunya adalah sbb:

- Data Entry => SKPD => Pembukuan => Posting Data => Pilih SKPD => Posting
- Data entry => SKPKD => Pembukuan => Posting Data => Pilih SKPD => Posting

b. Digunakan untuk posting transaksi basis akrual.

Menunya adalah sbb:

- Data Entry => SKPD => Pembukuan => Posting Data => Pilih SKPD => Posting Data-jurnal akrual
- Data entry => SKPKD => Pembukuan => Posting Data => Pilih SKPD => Posting Data -Jurnal Akrual

Pastikan bahwa semua transaksi pembukuan sudah di posting dan untuk meyakinkan apakah semua jurnal/transaksi sudah diposting dapat dilihat dari

report daftar jurnal yang belum di posting di menu Laporan => SKPD
=>Pembukuan => pilih daftar jurnal yang belum di posting => pilih SKPD dan
Preview.

5. Proses Tutup Tahun

Proses ini dilakukan setelah semua transaksi penatausahaan maupun akuntansi telah seluruhnya diposting. Poses tutup tahun diakses melalui menu Data Entry =>SKPD => Pembukuan => Proses tutup tahun kemudian isikan tanggal tutup tahun dengan format yyyy/mm/dd. Contoh penulisan tanggal tutup tahun : 20161231.